



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2020

Pusat Pengembangan dan Pelindungan
Bahasa dan Sastra

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



KATA PENGANTAR

Plt. Kepala Pusat Pengembangan dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah swt., Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra berhasil menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 dengan tepat waktu.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun. Sehubungan dengan itu, laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran kegiatan beserta indikator kerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra tahun 2020.

Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra pada tahun 2020 menetapkan lima sasaran kegiatan dan 13 indikator kinerja kegiatan. Secara umum, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

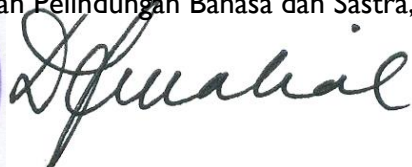
Meskipun telah banyak capaian keberhasilan, masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan pada tahun mendatang. Koordinasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan harus terus ditingkatkan antarberbagai pihak yang terlibat, baik di Pusat maupun di daerah. Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi dapat segera terselesaikan.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra pada tahun 2020. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan, serta peningkatan kinerja pada tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra pada tahun 2020.



Jakarta, Januari 2021
plt. Kepala Pusat Pengembangan
dan Pelindungan Bahasa dan Sastra,



Dr. Dora Amalia
NIP 197107292002122001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi	3
D. Isu-Isu Strategis/Permasalahan Utama	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	8
A. Capaian Kinerja	8
1. Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia	8
2. Terwujudnya standar kemahiran berbahasa Indonesia	20
3. Meningkatnya jumlah partisipan aktif dalam pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan.....	36
4. Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah.....	45
5. Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	73
B. Realisasi Anggaran	79
C. Efisiensi Sumber Daya	82
BAB IV PENUTUP	83

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2020
3. Pernyataan Reviu Laporan Kinerja

IKHTISAR EKSEKUTIF

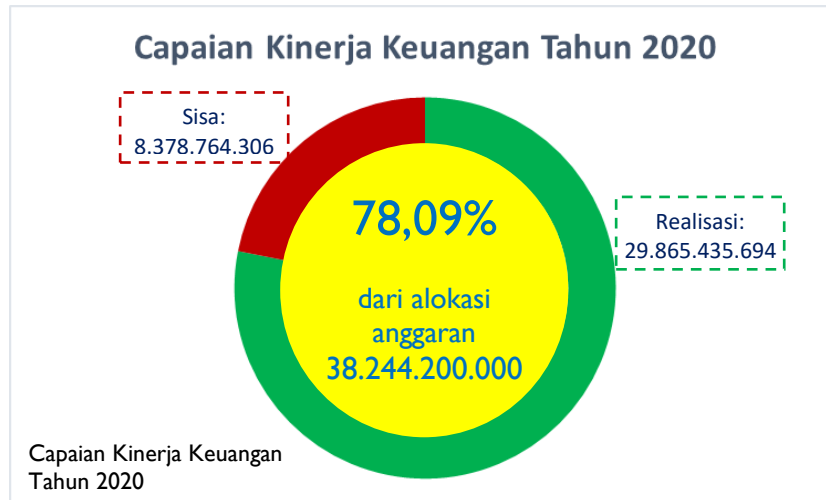
Laporan Kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra tahun 2020 menyajikan tingkat pencapaian lima sasaran kegiatan dengan 13 indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020. Tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator kinerja secara detail diuraikan pada Bab III.

Secara umum, capaian kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra tahun 2020 dapat dilihat pada Grafik berikut.



Ringkasan Capaian Kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Tahun 2020

Adapun capaian kinerja keuangan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut.



Beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain adalah:

- proses penggabungan anggaran dari Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK) yang sebagian besar dari anggarannya digabung ke Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra yang terjadi sebagai konsekuensi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- penyesuaian yang harus dilakukan pada tahun pertama periode rencana strategis tahun 2020—2024;
- pandemi Covid-19 yang mengakibatkan adanya kebijakan pembatasan kegiatan/perjalanan dinas;
- komunikasi yang kurang maksimal di tengah kondisi pandemi;
- revisi anggaran yang harus dilakukan untuk menyesuaikan dengan keadaan pandemi ataupun untuk mendukung program prioritas pada Kementerian terkait pandemi;
- instrumen/model pelaksanaan kegiatan yang telah disusun di awal tahun harus mengalami penyesuaian dengan kondisi pandemi;
- kurangnya sumber daya manusia (SDM) pelaksana kegiatan, baik dari segi jumlah maupun kualifikasinya;
- adanya program/kebijakan kelompok kepakaran layanan profesional (KKLP) yang menyebabkan terpecahnya fokus pelaksanaan kegiatan terhadap model baru tersebut; dan



- i. belum maksimalnya koordinasi antara Pusat dan UPT dalam proses pelaksanaan pencapaian target kinerja.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul antara lain adalah:

- a. melakukan proses revisi anggaran dan memantau proses berjalannya revisi penggabungan anggaran PPSDK ke Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra;
- b. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait Renstra 2020—2024;
- c. melakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan, baik penyesuaian metode pelaksanaan, anggaran, instrumen, titik pengamatan, maupun lokasi pelaksanaan kegiatan;
- d. melakukan inovasi dalam pelaksanaan kegiatan;
- e. memaksimalkan komunikasi dan pelaksanaan kegiatan melalui fasilitas pertemuan secara daring/virtual;
- f. peningkatan komunikasi dan koordinasi antara Pusat dan seluruh balai/kantor bahasa dalam melaksanakan kegiatan pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra; dan
- g. memaksimalkan kinerja SDM yang ada, baik tenaga PNS maupun tenaga non-PNS, ataupun melakukan kerja sama dengan pihak luar yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan.



BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra merupakan satuan kerja yang berada di bawah pembinaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra pertama kali dibentuk tahun 2010, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 dengan nama Pusat Pengembangan dan Pelindungan.



Perkembangan Nomenklatur Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Pada tahun 2020 Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dipimpin oleh Dr. Dora Amalia sebagai plt. Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra. Sementara itu, jumlah SDM yang ada saat ini sebanyak 186 orang yang terdiri atas 149 PNS dan 37 pegawai nonpegawai negeri. Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra mempunyai cakupan wilayah kerja di seluruh wilayah Indonesia.



Jumlah Pegawai Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra



B. Dasar Hukum

Dalam melaksanakan penyusunan program kerja, anggaran, dan laporan, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra mengacu pada peraturan perundang-undangan berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
- 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- 10) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020--2024;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



- 14) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- 15) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 152 Tahun 2003 tentang Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia;
- 16) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa;
- 17) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 tahun 2016 tentang Rincian Tugas Kantor Bahasa;
- 18) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 19) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- 20) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024.

C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi

1) Tugas

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra mempunyai tugas **melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra dan pengembangan strategis dan diplomasi kebahasaan serta urusan ketatausahaan Pusat.**

2) Fungsi

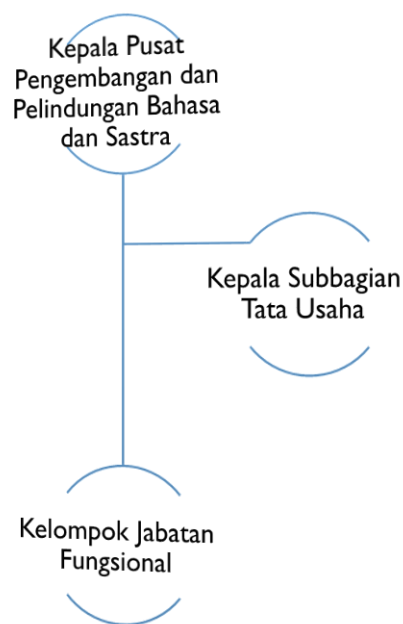
Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra dan pengembangan strategis dan diplomasi kebahasaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra dan pengembangan strategis dan diplomasi kebahasaan;

- c. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra dan pengembangan strategis dan diplomasi kebahasaan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra dan pengembangan strategis dan diplomasi kebahasaan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Pusat.

3) Struktur Organisasi

Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra terdiri atas satu Kepala Pusat (eselon II), satu Kepala Subbagian Tata Usaha (eselon IV), dan Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti. Bagan struktur organisasi Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut.



Struktur Organisasi Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

D. Isu-Isu Strategis/Permasalahan Utama

- 1) Rendahnya sikap positif masyarakat terhadap bahasa dan sastra di Indonesia sebagai kekayaan dan warisan budaya bangsa.
- 2) Luasnya jangkauan wilayah pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra.

- 3) Pemakaian kosakata di lingkungan masyarakat yang berkembang pesat seiring dengan cepatnya perkembangan dunia teknologi dan informasi.
- 4) Pandemi Covid-19 menyebabkan kemunculan dan kepopuleran berbagai istilah kesehatan berbahasa asing yang perlu segera dipadankan dan disebarluaskan kepada masyarakat karena berkaitan dengan edukasi kesehatan masyarakat.
- 5) Bahasa dan sastra daerah yang tersebar di seluruh Indonesia masih banyak yang belum dikaji vitalitasnya dan banyak yang terancam punah.
- 6) Masyarakat di daerah (terutama generasi muda) cenderung mulai meninggalkan bahasa daerah.
- 7) Sastra nasional atau sastra kontemporer belum banyak diidentifikasi dan diklasifikasikan menurut kajian-kajian mendalam.
- 8) Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk kebahasaan/kesastraan yang berbasis teknologi informasi.
- 9) Penggunaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) yang makin luas serta perkembangan teknologi yang makin pesat menuntut dikembangkannya pengujian berbasis internet.
- 10) Kurangnya akses masyarakat terhadap produk pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra.
- 11) Banyaknya warga negara asing yang tertarik untuk berkunjung ke Indonesia, baik untuk tujuan investasi maupun keperluan lainnya, yang mengakibatkan banyaknya warga asing ingin mempelajari bahasa Indonesia.
- 12) luasnya kawasan sasaran sebagai populasi kajian pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan serta terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang mumpuni dan berpengalaman dalam penyusunan bahan diplomasi bahasa Indonesia untuk penutur asing.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Visi

Visi Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra mengacu kepada visi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang tertuang dalam rencana strategis tahun 2020—2024 yang mengacu kepada visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diturunkan dari visi Presiden, yaitu **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.**

Misi

Untuk menjalankan visi tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki misi sebagai berikut.

- 1) Mewujudkan ekosistem pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra yang mendukung budaya riset dan inovasi kebahasaan yang kreatif.
- 2) Mewujudkan praktek-praktek pendidikan literasi di masyarakat untuk meningkatkan budaya literasi yang tinggi yang ditopang oleh teknologi digital.
- 3) Mewujudkan penguatan diplomasi kebahasaan yang maju. Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2020 —2024 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 4) Mewujudkan pelindungan bahasa dan sastra yang dinamis berbasis kekuatan masyarakat.
- 5) Mewujudkan layanan profesional kebahasaan.

Tujuan Strategis

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diturunkan dari visi presiden, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan tujuan strategis lembaga, yaitu (1) melakukan peningkatan layanan profesional kebahasaan;



(2) melakukan pelindungan bahasa dan sastra yang dinamis berbasis kekuatan masyarakat dan melakukan penguatan diplomasi kebahasaan yang maju; (3) praktik-praktik pendidikan literasi di masyarakat untuk meningkatkan budaya literasi yang tinggi yang ditopang oleh teknologi digital dan mendorong terwujudnya ekosistem pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra yang mendukung budaya riset dan inovasi kebahasaan yang kreatif.

Sementara itu, tujuan strategis Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra mengacu pada sasaran program yang ada pada Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020—2024, yang terkait dengan tugas dan fungsi Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, yaitu

1. meningkatnya daya hidup bahasa daerah,
2. meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional, dan
3. terwujudnya tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang berkualitas.

Dalam rangka mencapai tujuan strategis, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra menetapkan target tahunan yang akan dicapai, yaitu melalui perjanjian kinerja tahun 2020. Berikut adalah ringkasan Perjanjian Kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra tahun 2020.

Tabel Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1. Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia	1.1 Jumlah kosakata bahasa Indonesia	kosakata	16.000
2. Terwujudnya standar kemahiran berbahasa Indonesia	2.1 Jumlah instrumen uji kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI)	baterai	4
	2.2 Jumlah acuan kebahasaan dan kesastraan	naskah	3
	2.3 Jumlah bahan ajar kebahasaan	naskah	7
	2.4 Jumlah rekomendasi kebijakan kebahasaan dan kesastraan melalui penelitian	dokumen	38
3. Meningkatnya jumlah partisipan aktif dalam pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan	3.1 Jumlah lembaga terfasilitasi secara kebahasaan	lembaga	112
	3.2 Jumlah pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)	orang	220
	3.3 Jumlah bahan pengayaan laboratorium kebahasaan	bahan	50
4. Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam	4.1 Jumlah penutur muda yang terlibat dalam pelindungan bahasa daerah kritis dan terancam punah	orang	500
	4.2 Jumlah penutur muda yang terlibat dalam pelindungan sastra daerah kritis dan terancam punah	orang	500
	4.3 Jumlah produk kesastraan terkembangkan	dokumen	4
5. Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	5.1 Predikat sapik satker minimal BB	predikat	BB
	5.2 Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L satker minimal 91	nilai	91

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2020, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra menetapkan lima sasaran kegiatan dengan 13 indikator kinerja kegiatan. Berikut informasi tingkat ketercapaiannya selama tahun 2020.

Sasaran I “Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia”

Daya ungkap berhubungan erat dengan kuantitas dan keanekaragaman kosakata yang dimiliki sebuah bahasa. Dalam konteks Indonesia, daya ungkap dipengaruhi oleh keanekaragaman budaya dan bahasa daerah, perkembangan teknologi dan konsep keilmuan di Indonesia, serta sentuhan budaya asing. Meningkatnya perkembangan teknologi, konsep keilmuan, serta pengaruh budaya asing dalam kehidupan masyarakat Indonesia menyebabkan daya ungkap bahasa Indonesia harus mengalami peningkatan untuk dapat mengimbangi. Berbagai istilah asing yang berkembang perlu dikumpulkan, dipadankan, didokumentasikan, dan dipublikasikan untuk meningkatkan literasi masyarakat. Selain menawarkan kosakata budaya, bahasa daerah juga berpotensi menjadi sumber padanan berbagai istilah asing yang berkembang di Indonesia. Usaha peningkatan daya ungkap bahasa Indonesia diakomodasi melalui kegiatan-kegiatan yang relevan, seperti inventarisasi kosakata, sidang komisi istilah, penyusunan kamus bidang ilmu, dan penyuntingan kamus etimologi.

Peningkatan daya ungkap bahasa Indonesia pada dasarnya dapat dilakukan dengan beberapa strategi, yaitu pemanfaatan teknologi, peningkatan kompetensi dan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas, serta pelibatan ekosistem kebahasaan. Teknologi digunakan untuk mempermudah penelusuran kosakata potensial dalam media dan sumber referensi lain, pencatatan usulan kosakata yang terstruktur, dan menunjang koordinasi pusat-UPT yang intensif.

Aspek lain yang juga penting dalam peningkatan daya ungkap bahasa Indonesia adalah masyarakat dalam ekosistem kebahasaan. Untuk mencapai akselerasi peningkatan daya ungkap bahasa Indonesia, masyarakat perlu berperan tidak hanya sebagai pengguna tetapi juga sebagai pemeriksa dan pengoreksi. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut,

Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra telah dan terus menyediakan serta mengembangkan media pelibatangannya, yaitu KBBI Daring. Pelibatan masyarakat juga direalisasikan dengan penerimaan dan pemberian tanggapan atas berbagai kritik, saran, dan pertanyaan tentang istilah dan produk leksikografi yang masuk melalui posel. Pelibatan pihak swasta yang dapat berperan dalam penyebarluasan atau pengembangan produk leksikografi juga perlu dilakukan untuk meningkatkan publikasi produk.

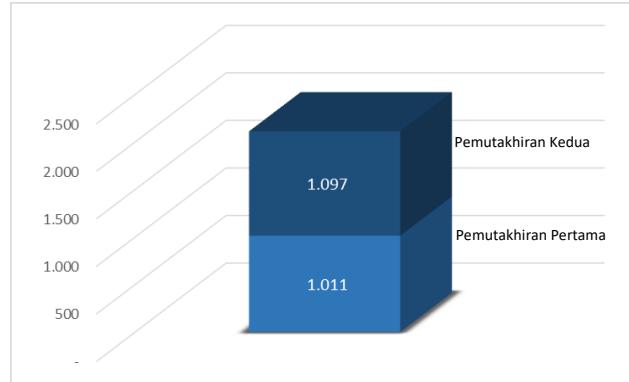
Selain teknologi dan pelibatan ekosistem kebahasaan, berbagai pelatihan dan tolok banding (*benchmarking*) terhadap tren kamus internasional perlu dilakukan untuk memastikan substansi dan kualitas produk leksikografi berkembang dan termutakhirkan. Hal ini tentu tidak akan lengkap jika tim kerja tidak dilengkapi dengan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas. Untuk itu, penyediaan sumber daya manusia, koordinasi pusat dan UPT, serta usaha-usaha peningkatan kompetensi perlu dilakukan secara berkesinambungan.

IKK 1.1 “Jumlah kosakata bahasa Indonesia”

Tabel Capaian Kinerja

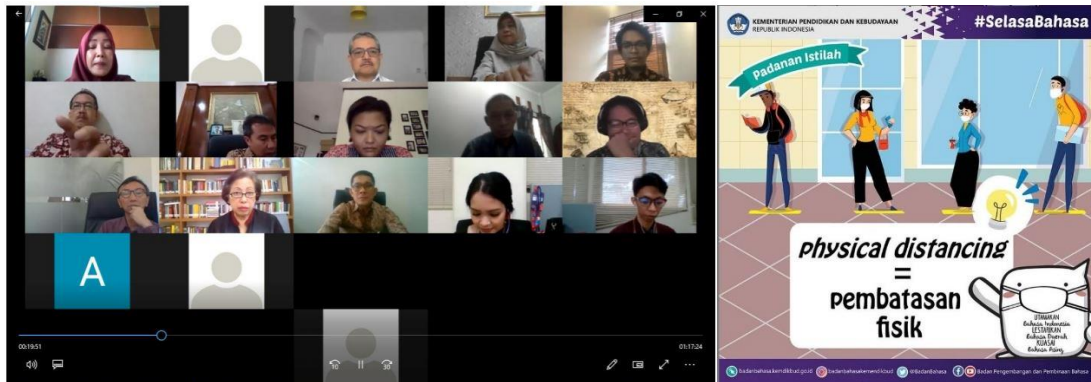
Baseline Renstra	Tahun 2020			Target Akhir Renstra	Capaian Renstra pada Tahun 2020
	Target	Realisasi	%		
112.538	16.000	15.599	97,49	200.000	128.137

Untuk menjawab kebutuhan istilah kesehatan yang berkembang dan populer dalam waktu cepat, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra melakukan inventarisasi kosakata dari media dan referensi terkait. Selain itu, tim kamus juga melakukan tolok banding dengan data pemutakhiran kamus lain untuk mengetahui tren kosakata yang sedang berlangsung, seperti Merriam Webster. Tolok banding tersebut menghasilkan simpulan bahwa isu kesehatan menjadi elemen penting dalam pemutakhiran yang dilakukan oleh kamus tersebut. Dalam pemutakhiran Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pada bulan April dan Oktober, istilah kesehatan juga menjadi salah satu elemen pemutakhiran. Pada tahun 2020, terdapat 2.108 entri baru yang telah ditambahkan ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.



Grafik Penambahan Entri KBBI melalui Pemutakhiran KBBI

Tim Perkamusan dan Peristilahan juga melakukan pelibatan ekosistem kebahasaan yang terdiri atas instansi yang relevan dalam penanganan dan/atau penyebaran informasi terkait Covid-19, seperti Gugus Tugas Covid-19, Kantor Staf Presiden, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Sekretariat Negara, ahli kesehatan, penerjemah, media massa, dan penggiat bahasa dalam melakukan pencatatan, pepadanan, serta pembentukan kaidah istilah yang berkaitan dengan Covid-19. Istilah-istilah yang telah dipadankan tersebut disebarluaskan ke 59 instansi pemerintahan. Untuk memperluas jangkauan, istilah yang berkaitan dengan pandemi Covid-19 juga divisualisasikan dalam infografis media sosial Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.



Rapat Pepadanan Istilah yang Berkaitan dengan Pandemi Covid-19 dan Upaya Publikasi Istilah yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Sebagai upaya pengembangan kamus, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra melakukan verifikasi entri-entri dengan tema tertentu dalam rangka pemutakhiran kamus. Pada tahun 2020, Tim Perkamusan dan Peristilahan melakukan verifikasi entri yang berkaitan dengan flora dan fauna dalam rangka pemutakhiran kamus. Hal ini selain untuk memeriksa ketepatan konsep sebuah entri dalam kamus juga dilakukan untuk membentuk entri model yang tepat. Verifikasi ini melibatkan pakar-pakar dari LIPI yang memiliki kompetensi dalam bidang flora dan fauna. Upaya ini merupakan komitmen

Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra untuk mengembangkan bukan hanya kuantitas tetapi juga kualitas kosakata dalam produk leksikografinya.

Entri Model

No	Entri Model	No	Entri Model
1	kuntul perak n burung air liar termasuk keluarga kuntul, berukuran besar, berwarna putih, leher berbentuk S tanpa simpul, berkas bulu putih panjang pada punggung dan dada saat beriak, hidup sendiri dan berkelompok di perairan seperti sawah, pantai, danau dan rawa; sering mencari makan bersama dengan kuntul dan cangkak lain; <i>Egretta intermedia</i>	5	bangau tongtong n burung air liar termasuk keluarga bangau, berukuran sangat besar, berwarna hitam dan putih, sayap punggung dan ekor hitam, perut putih, kepala botak, leher dan tenggorokan merah jambu, hidup sendiri dan berkelompok di perairan seperti sawah, pantai, danau dan rawa, terbang melayang berputar; <i>Leptoptilos javanicus</i>
2	kuntul kerbau n burung air liar termasuk keluarga kuntul, berukuran kecil, berwarna putih, buku bekap, leher dan dada berwarna jingga saat beriak, hidup sendiri dan berkelompok, sering terlihat di sawah dan padang rumput, kadang-kadang bersama sapi, kerbau atau banteng; <i>Bubulcus ibis</i>	1.7	elang kelelawar n burung pemangsa liar termasuk keluarga elang, berukuran kecil, berwarna hitam, berjambul pendek penjurat, tenggorokan putih, sayap terlihat meruncing saat terbang, hidup di daerah terbuka dan dekat gua kelelawar, aktif senja hari memangsa kelelawar yang keluar masuk gua; <i>Machirophaps olivacea</i>
3	cangkak merah n burung air liar termasuk keluarga cangkak, berukuran besar, berwarna abu-abu, coklat dan hitam, mahkota hitam dengan jambul menjuntai, setip hitam sepanjang leher yang berwarna karat, hidup sendiri dan berkelompok di perairan seperti sawah, pantai, danau dan rawa, sering mencari makan bersama dengan kuntul dan cangkak lain; <i>Ardeio purpuracea</i>	1.8	ranglong gading n burung liar termasuk keluarga enggang, berukuran sangat besar, berwarna coklat dan putih, bulu ekor tengah memanjang, memiliki tanduk atau gading pada di atas paruh atas berwarna kekuningan dan merah, leher merah pada jantan dan biru pada betina, bersuara keras seperti orang tertawa, hidup sendiri atau dalam kelompok kecil di hutan sekunder dan primer, mencari makan di pohon-pohon besar yang berbuah; <i>Rhinoplos vigil</i>
4	bangau sandang lawe n burung air liar termasuk keluarga bangau, berukuran sangat besar, berwarna hitam dan putih, mahkota hitam, leher putih, sayap dan ekor hitam, perut putih, hidup sendiri dan berkelompok di perairan seperti sawah, pantai, danau dan rawa; sering mencari makan bersama dan bertengger di pohon tinggi bersama bangau lain, terbang melayang berputar; <i>Ciconia episcopus</i>		
	bangau storm n burung air liar termasuk keluarga bangau, berukuran sangat besar, berwarna hitam dan putih dengan paruh merah, mahkota hitam, sisi leher hitam, sayap dan ekor hitam, perut putih, hidup sendiri dan berkelompok di perairan seperti sawah, pantai, danau dan rawa; sering mencari makan bersama dan bertengger di pohon tinggi bersama bangau lain, terbang melayang berputar; <i>Ciconia stormi</i>		

Verifikasi Kosakata Flora dan Fauna dalam Rangka Pemutakhiran Kamus

Upaya pengembangan kamus lain yang dilakukan adalah penambahan informasi etimologi yang terintegrasi dengan kosakata yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kosakata bahasa asing diserap menjadi kosakata bahasa Indonesia melalui berbagai cara, yaitu pemadanan, penerjemahan, dan penyesuaian penulisan atau pelafalan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak semua kosakata bahasa asing yang diserap diberikan label asal bahasa asingnya. Kosakata yang diberi label hanya kosakata yang masih memiliki bentuk mendekati atau persis dengan kosakata sumbernya. Penambahan informasi etimologi dilakukan untuk melacak informasi etimologis suatu kata, yakni asal-usul serta perubahan bentuk dan makna suatu kata yang belum termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pada tahun 2020 informasi etimologi yang ditambahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah etimologi Sanskerta. Selain itu, penyuntingan etimologi Belanda dan Jawa Kuno juga dilakukan, sehingga capaian kosakata dari penyuntingan kamus etimologi pada tahun 2020 mencapai 3.000 kosakata.

adi.rat.na

→ Tesaurus

Etimologi: [Sanskerta **अधि** 'di atas' dan **रत** **ratna** 'batu permata, kekayaan']
 Telusuri Selengkapanya

1. n permata yang mulia
2. n ki perempuan yang cantik

adi.rat.na

Etimologi:

Sanskerta **अधि** **adhi** p 'di atas'
 dan
 Sanskerta **रत** **ratna** n net 'batu permata, kekayaan'

Sumber:

- Russell Jones, Loan-words in Indonesian and Malay, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008)
- Sir Monier Monier-Williams, M.A., K.C.I.E (1899) Sanskrit-English Dictionary Etymologically and Philologically Arranged with Special Reference to Cognate Indo-European Languages. Oxford: University Press
- Arthur Anthony Macdonell (1929) A Practical Sanskrit Dictionary With Transliteration, Accentuation, and Etymological Analysis Throughout. London: Oxford University Press

[Sanskerta **अधि** p 'di atas' dan dari **रत** **ratna** n net 'batu permata, kekayaan']

Informasi Etimologi Sanskerta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

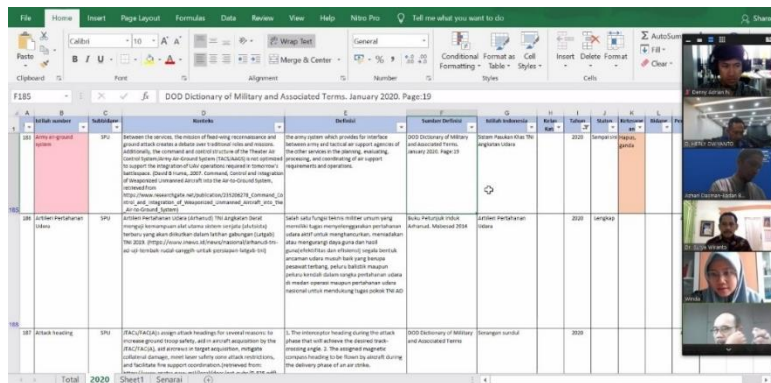
Upaya pengembangan kamus lain yang dilakukan adalah penyusunan kamus bidang ilmu. Kamus Bidang Ilmu merupakan kamus yang digunakan sebagai rujukan yang memuat sejumlah istilah yang disusun secara alfabetis disertai dengan definisinya. Kamus Bidang Ilmu sangat diperlukan untuk memperluas wawasan para ilmuan khususnya para dosen, mahasiswa, penerjemah, dan lain-lain ketika mereka memerlukan padanan dan makna suatu kata. Kamus ini dapat memberikan informasi tentang istilah khusus suatu bidang ilmu, padanan, dan maknanya. Kamus Bidang Ilmu ini menjadi penting karena memuat istilah, padanan dan definisi dari berbagai bidang ilmu. Pada tahun 2020 kegiatan Kamus Bidang Ilmu berfokus pada penyusunan sepuluh kamus dengan jumlah total 8.966 kosakata.



10 Kamus Bidang Ilmu yang dihasilkan pada Tahun 2020

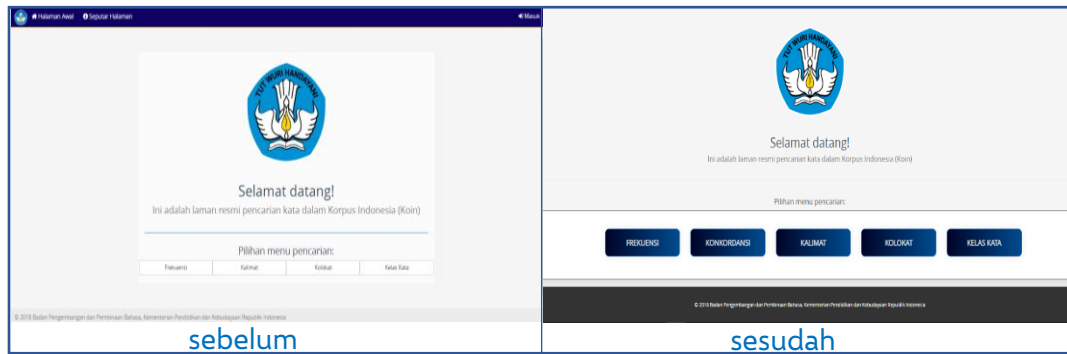
Selain upaya pengembangan kamus, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra juga melakukan upaya pengembangan kosakata melalui Sidang Komisi Istilah. Sidang Komisi Istilah dilakukan untuk mengindonesiakan istilah dan menyelaraskan istilah yang sudah dipadankan. Dalam kegiatan ini dihadirkan pakar dari bidang ilmu yang sudah ditentukan sebelumnya. Pakar bidang ilmu tersebut bekerja dalam kelompok sendiri sesuai dengan bidangnya yang masing-masing dibantu oleh dua orang ahli bahasa. Hasil Sidang Komisi Istilah ini menjadi bahan dasar untuk menyusun kamus bidang ilmu. Pada tahun 2020

Sidang Komisi Istilah dilaksanakan secara daring sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19. Sidang Komisi Istilah dilaksanakan pada bulan Agustus 2020 dan dilakukan selama dua hingga tiga jam selama tiga hari. Sidang yang berhasil mengumpulkan 1.525 entri baru ini terbagi atas tujuh komisi, yaitu Komisi Istilah Ilmu Psikologi, Komisi Istilah Ilmu Batik, Komisi Istilah Ilmu Komunikasi, Komisi Istilah Ilmu Pertahanan Subbidang Strategi Pertahanan Udara, Komisi Istilah Ilmu Pertahanan Subbidang Damai dan Resolusi Konflik, Komisi Istilah Ilmu Kelautan Subbidang Teknik Pantai, dan Komisi Istilah Ilmu Kelautan Subbidang Oseanografi Biologi.



Pelaksanaan Sidang Komisi Istilah secara Daring

Upaya lain yang dilakukan dalam pengembangan kosakata adalah pemutakhiran korpus. Pengembangan Korpus Indonesia bertujuan untuk menyediakan data kebahasaan dalam bentuk digital dan dalam jumlah besar yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan. Pengembangan Korpus Indonesia ini juga sangat penting dalam menunjang tugas pokok dan fungsi pengembangan bahasa dan sastra, khususnya untuk penyusunan kamus, penyusunan buku ajar, penyusunan soal, penelitian bahasa dan sastra, serta tujuan lain yang serupa. Pada tahun 2020 terdapat beberapa penambahan dan pembaruan fitur yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja aplikasi Korpus Indonesia sehingga aplikasi ini semakin ramah pengguna. Penambahan dan pembaruan fitur tersebut melingkupi pembaruan master kata, penambahan master kategori, pendesainan kembali tampilan laman, penambahan fitur edit “tentang halaman”, penambahan rentang kolokat, pembaruan pencarian kalimat, penambahan statistik laman, penambahan sumber berkas, dan penambahan konkordansi.



Perbandingan Aplikasi Korpus Indonesia, Sebelum dan Sesudah Pemutakhiran

Pandemi Covid-19 memiliki berbagai implikasi dalam banyak aspek kehidupan. Dalam aspek pemutakhiran kamus, pandemi Covid-19 menjadi salah satu aspek pemer kaya kosakata bahasa Indonesia. Berbagai istilah kesehatan khususnya epidemi yang awalnya bersifat sangat teknis dan diketahui sebagian kalangan menjadi populer sehingga perlu didokumentasikan dalam kamus umum karena urgensi dan popularitasnya. Pandemi ini juga mendorong kerja sama pepadanan istilah dan meningkatkan pelibatan berbagai elemen dalam ekosistem kebahasaan. Hal inilah yang menjadikan target pemutakhiran kamus dapat tercapai dengan baik.

Kendati demikian, pandemi Covid-19 juga memiliki implikasi buruk bagi pelaksanaan berbagai kegiatan lain, seperti Sidang Komisi Istilah dan Konferensi Asialex. Sidang Komisi Istilah yang sedianya dilaksanakan dua kali selama lima hari penuh secara tatap muka harus diubah format pelaksanaannya menjadi sidang daring. Hal ini merupakan respons cepat Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dalam menyesuaikan diri dengan keadaan pandemi dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Perubahan format pelaksanaan sidang ini tentu memiliki dampak yang besar terhadap kegagalan pencapaian target. Kendati demikian, Sidang Komisi Istilah daring pertama yang dilaksanakan selama berdirinya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ini dapat berjalan lancar. Berbeda dengan Sidang Komisi Istilah, Konferensi Asialex sebagai acara leksikografi internasional yang sedianya diselenggarakan di Indonesia pada tahun ini terpaksa ditunda untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Pandemi Covid-19 juga memiliki dampak pada inventarisasi kosakata. Kegiatan yang sedianya dilakukan dalam format pencarian data lapangan, lokakarya, dan SKBD mengalami penundaan atau pembatalan. Kendati demikian, koordinasi Pusat dan UPT tetap dilaksanakan secara intensif dan berkesinambungan demi tercapainya kinerja secara optimal.



Peningkatan kompetensi yang sedianya dilaksanakan secara tatap muka juga dapat dilakukan lebih fleksibel dalam kerangka kelompok kepakaran layanan profesional dengan bantuan teknologi. Hal ini merupakan komitmen Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra untuk tetap memberikan performa terbaik walaupun terdapat pandemi.

Hambatan/Kendala

Dalam pelaksanaan tugas, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra mengalami dua jenis kendala, yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal terjadi akibat belum tersedianya sumber daya manusia untuk menduduki posisi admin dan pengembang aplikasi dengan kualifikasi pendidikan teknik informatika (TI) yang memiliki kemampuan pengolahan pangkalan data dan pengembangan sistem aplikasi. Sebagai kelompok kerja yang menciptakan dan mengembangkan berbagai produk berbasis teknologi, hal ini tentu sangat disayangkan. Ketiadaan sumber daya manusia ini memperlambat kinerja kelompok kerja. Selain itu, jumlah analis kata dan istilah dengan berbagai latar belakang pendidikan, seperti bahasa Mandarin, Prancis, Jawa, Arab, Belanda, dan sebagainya sebagai motor penggerak utama juga masih belum sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu, perlu adanya pengajuan SDM untuk mengisi posisi tersebut.

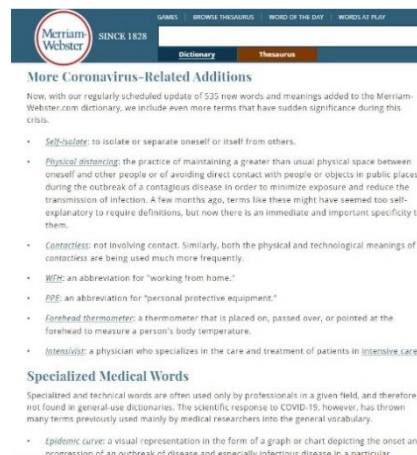
Kendala lain yang dialami adalah dukungan fasilitas kerja yang belum memadai, seperti fasilitas kerja berupa akses langganan ke media massa. Akses langganan ini berhubungan erat dengan kemudahan inventarisasi kosakata dalam rangka peningkatan daya ungkap bahasa Indonesia. Akses langganan yang dimaksud bukan hanya berupa akses koran atau majalah tetapi akses ke konten digital premium media tersebut, seperti artikel riset, artikel pengembangan, serta akses arsip.

Kendala eksternal yang dihadapi adalah adanya pandemi Covid-19. Covid-19 menyebabkan pembatasan gerak pada berbagai aspek kehidupan, begitu pula terhadap pelaksanaan kegiatan. Hal ini pada akhirnya berkontribusi dalam pelambatan atau penurunan capaian target kinerja, seperti capaian Sidang Komisi Istilah dan Inventarisasi Kosakata Bahasa Daerah.

Langkah Antisipatif

Langkah-langkah antisipatif yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada, yaitu

1. mengajukan permintaan tambahan SDM untuk posisi yang dibutuhkan,
2. mengajukan surat permintaan fasilitas pendukung kerja,
3. melanjutkan kontrak kerja tenaga teknis yang berkualifikasi dalam bidang linguistik, terutama leksikografi dan terminologi,
4. mencari pengembang lepas yang memiliki kemampuan pembuatan pangkalan data dan sistem aplikasi,
5. melakukan inventarisasi kosakata dari berbagai media untuk mendokumentasikan kata berfrekuensi tinggi atau kata yang terkait dengan bidang ilmu tertentu dengan menggunakan sarana yang tersedia saat ini,
6. mengamati tren penambahan kosakata yang dilakukan kamus internasional lain sebagai referensi pembanding,
7. melakukan penyederhanaan dan perubahan format kegiatan dengan memanfaatkan teknologi, dan
8. melakukan koordinasi daring dengan UPT.



Proses Mengamati Tren Perkembangan Dokumentasi Kata dalam Kamus Internasional

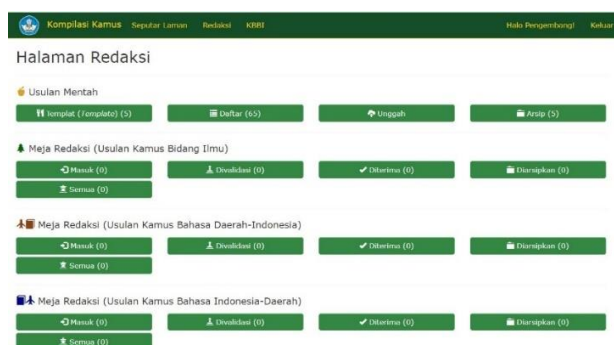


Inovasi

Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra mengembangkan sarana yang dapat mempermudah dan mempercepat pengerjaan tugas sebagai bagian dari inovasi yang dilakukan. Pada tahun 2020 tim Pusat mengembangkan Aplikasi Pangkalan Data Kamus atau yang disebut Aplikasi Kompilasi Kamus.

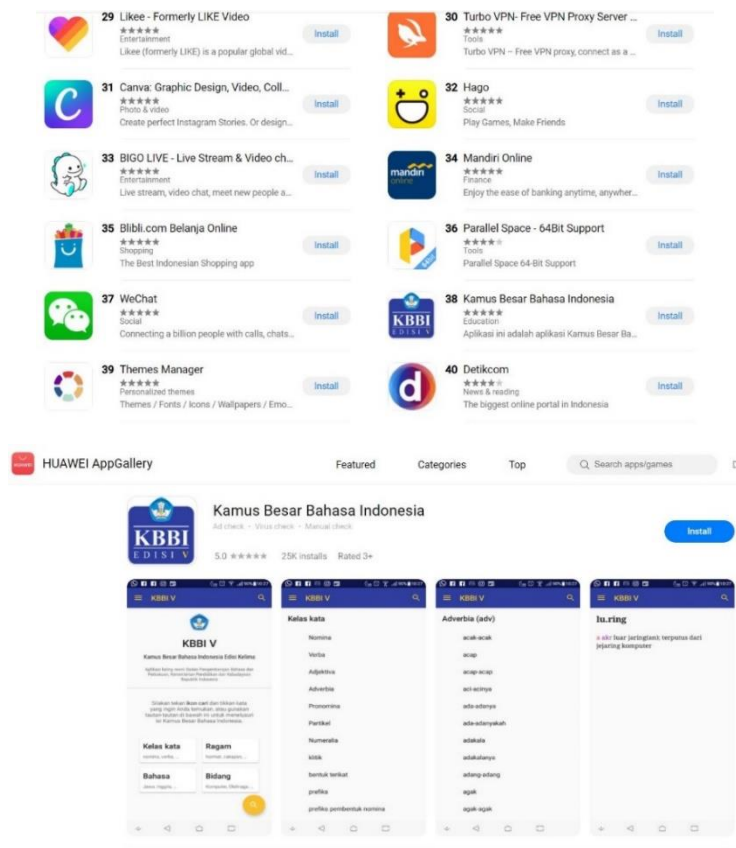
Aplikasi Pangkalan Data Kamus atau dikenal dengan Aplikasi Kompilasi Kamus merupakan aplikasi daring bagi penyusunan dan pencarian entri berbagai macam jenis kamus di Indonesia. Aplikasi Pangkalan Data Kamus saat ini baru digunakan secara internal karena masih dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan. Aplikasi Pangkalan Data Kamus memberikan platform kerja bagi penyusunan berbagai jenis kamus di Indonesia yang masuk dalam 5 kategori besar kamus, yaitu Kamus Bidang Ilmu, Kamus Bahasa Daerah-Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia-Daerah, Kamus Bahasa Daerah, dan Kamus Bahasa Asing. Melalui aplikasi ini, penyusunan dan pencarian entri berbagai jenis kamus dapat dilakukan secara daring. Hal ini memberikan kemudahan karena dapat menggantikan proses penyusunan dan pencarian entri kamus yang biasa dilakukan secara manual (lewat kertas dan buku kamus) dan luring (tanpa jaringan internet).

Selain berorientasi pada cara kerja tim perkamus, keunggulan lain Aplikasi Pangkalan Data Kamus adalah fleksibilitasnya yang besar karena mencakup berbagai macam kategori kamus yang dapat disusun dengan menggunakan satu aplikasi dengan satu cara kerja. Penciptaan aplikasi ini merupakan langkah strategis dalam menjawab kebutuhan aplikasi nonmonolitik, yaitu aplikasi satu platform yang efisien, hemat sumber daya, dan mudah diintegrasikan. Aplikasi ini juga menjadi wadah kerja bagi usulan kosakata hasil inventarisasi yang dilaksanakan Balai/Kantor Bahasa. Kehadiran aplikasi ini membuat usulan kosakata lebih terstruktur dan terorganisasi sehingga diharapkan dapat memberikan kemudahan pada tugas Pusat dalam melakukan pengendalian dan pemantauan kinerja UPT.



Aplikasi Kompilasi Kamus

Usaha inovatif lain yang juga dilakukan oleh tim Pusat dalam menjawab tantangan transformasi digital yang makin cepat adalah menyediakan akses informasi kamus secara lebih luas. Untuk itu, pada tahun 2020 tim Pusat bekerja sama dengan Huawei telah mendaftarkan aplikasi KBBI luring pada Huawei AppGallery. Huawei AppGallery adalah platform aplikasi yang dikembangkan mandiri dalam sistem operasi perangkat Huawei. AppGallery ini telah terdapat di lebih dari 170 negara. Sejak KBBI luring dipublikasikan di AppGallery, aplikasi ini telah diunduh sebanyak 25.000 kali dan menduduki peringkat ke-38 teratas dengan lima bintang dan menjadi aplikasi pemerintahan tertinggi yang diunduh per 6 Desember 2020. Penyediaan aplikasi KBBI luring ini merupakan komitmen Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dalam menyediakan produk leksikografi berkualitas untuk kalangan yang lebih luas dalam jangka waktu tidak terbatas.



KBBI Luring dalam *Huawei AppGallery*

Pada tahun 2020 Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra juga melaksanakan pemindahan server KBBI. Lebih dari 70.000 akun pengguna terdaftar tercatat pada KBBI Daring. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak lebih dari 45.000 akun pengguna terdaftar. Pemindahan dan peningkatan kapasitas server



dilakukan untuk mengakomodasi peningkatan pengguna KBBI Daring dan mengantisipasi penambahan pengguna dalam beberapa tahun ke depan. Pemindahan server ini juga dilakukan untuk mempertahankan performa pencarian yang cepat sehingga diharapkan dapat mempertahankan kepuasan pengguna terhadap produk pemerintah.

Pengguna		Waktu	
Terdaftar:	71,870 (99.78 %)	Diluncurkan Sejak:	28-Oct-2016 15.30.00
Editor:	143 (0.20 %)	Waktu Peladen:	06-Dec-2020 10.50.40
Redaktur:	11 (0.02 %)	(Server):	
Validator:	1 (0.00 %)	Waktu Aktif:	1499 Hari 19 Jam 20 Menit 40 Detik
Total Terdaftar:	72,025 (100.00 %)		
Terkonfirmasi:	72,011 (99.98 %)		
Redaksi:	155 (0.22 %)		
Nonredaksi:	71,870 (99.78 %)		
Total Akses Unik:	2,863,586		
Rasio Daftar:	2.52 %		
Rasio Konfirmasi:	2.51 %		

Pengguna		Waktu	
Terdaftar:	45,723 (99.84 %)	Diluncurkan Sejak:	28-Oct-2016 15.30.00
Editor:	6 (0.01 %)	Waktu Rekam:	06-Dec-2019 10.30.10
Redaktur:	6 (0.01 %)	Waktu Aktif:	1133 Hari 19 Jam 0 Menit 10 Detik
Validator:	1 (0.00 %)		
Total Terdaftar:	45,796 (100.00 %)		
Terkonfirmasi:	45,770 (99.94 %)		
Redaksi:	73 (0.16 %)		
Nonredaksi:	45,723 (99.84 %)		
Total Akses Unik:	1,950,640		
Rasio Daftar:	2.35 %		
Rasio Konfirmasi:	2.35 %		

Kenaikan Jumlah Pengguna Terdaftar KBBI

Pada tahun 2020, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa kembali menetapkan satu kata menjadi kata tahun ini (KTI), setelah pada tahun sebelumnya juga ditetapkan KTI untuk pertama kali. Pada tahun sebelumnya, kata “milenial” menjadi KTI, sedangkan yang menjadi KTI pada tahun ini adalah kata “pandemi”.

KATA TAHUN INI (KTI) 2020


Pandemi




1. Kata *pandemi* termasuk kata populer di kamus-kamus besar dunia.
2. Kata *pandemi* merupakan salah satu kata yang masuk dalam 15 pencarian kata terpopuler sepanjang tahun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring.
3. Kata *pandemi* merupakan kata yang digunakan sepanjang tahun menurut Google Trends dengan jumlah penggunaan tertinggi pada bulan Mei 2020.
4. Kata *pandemi* menandai berbagai peristiwa.
5. Kata *pandemi* digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari pejabat hingga masyarakat umum.
6. Kata *pandemi* memiliki keluasan distribusi bidang yang merata di seluruh Indonesia.

kriteria pemilihan

- Daftar Kata Terpopuler pada KBBI Daring
- Kemunculan di Google Trends
- Penanda Berbagai Peristiwa
- Penggunaan oleh Berbagai Kalangan
- Keluasan Distribusi Bidang





Pengumuman KTI 2020 dan Berita Mengenai Penetapan KTI Tahun 2020



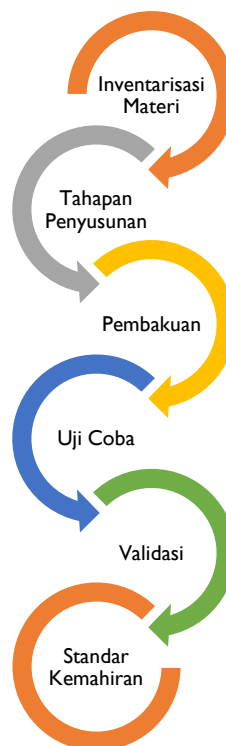
Sasaran 2

“Terwujudnya standar kemahiran berbahasa Indonesia”

Standar kemahiran berbahasa Indonesia lahir dan berkembang seiring dengan perkembangan penerapan bahasa Indonesia yang makin kukuh sebagai bahasa resmi negara dan makin meluas sebagai bahasa yang diharapkan dapat menjadi bahasa internasional. Perkembangan penerapan bahasa Indonesia itu dari waktu ke waktu selalu didasari oleh peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan pemerintah, terutama kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Standar kemahiran digunakan untuk menguji sejauh mana seseorang mahir menggunakan bahasa tersebut, baik lisan maupun tulisan. Pengujian biasanya diwujudkan dalam bentuk tes kemahiran yang harus memenuhi standar kesahihan. Instrumen yang digunakan harus dapat mengukur kemahiran penutur jati dan penutur asing dengan beragam karakteristik. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan serangkaian upaya penyusunan instrumen yang terarah dan sistematis agar dihasilkan standar kemahiran berbahasa Indonesia yang valid dan reliabel.

Untuk menghasilkan standar kemahiran tersebut diperlukan beberapa langkah kegiatan yang harus dilaksanakan, seperti yang tergambar pada grafik berikut.





- 1) Inventarisasi materi dilakukan untuk menjaring bahan mentah standard kemahiran. Penjaringan ini dilakukan dengan membentuk kerja sama dengan ekosistem kebahasaan dan ekosistem pendidikan. Secara khusus yang disasar adalah penutur bahasa Indonesia yang memiliki kualifikasi sebagai penulis bahan wacana, seperti guru, dosen, dan mahasiswa tingkat akhir.
- 2) Tahapan penyusunan merupakan langkah menyusun instrumen standar kemahiran dari bahan uji yang telah terinventarisasi dalam proses sebelumnya.
- 3) Rangkaian selanjutnya adalah pelaksanaan sidang pembakuan yang merupakan kegiatan untuk membakukan instrumen yang telah disusun. Pembakuan dilakukan oleh para pakar yang memiliki kompetensi untuk menguji validitas isi dan validitas konstruk atas soal yang telah disusun. Para pakar yang dihadirkan dalam sidang pembakuan terdiri atas pakar bahasa, pakar tes bahasa, pakar pendidikan bahasa, dan pakar psikometri.
- 4) Bahan uji yang telah dibuat di dalam baterai soal sesuai dengan komposisinya akan diujicobakan kepada responden untuk melihat tingkat validitas empirisnya. Karena soal kemahiran berbahasa digunakan secara nasional, calon peserta uji juga harus mewakili tiga wilayah Indonesia, yaitu wilayah timur, wilayah tengah, dan wilayah barat. Selain itu, karakteristik peserta uji coba pun harus mewakili berbagai karakteristik, yaitu pelajar SD (kelas 5), pelajar SMP (kelas 8), pelajar SMA (kelas 11), mahasiswa, guru, dosen, pegawai negeri/swasta, wartawan/editor/penulis/penerjemah, peneliti, dan profesi lain.
- 5) Langkah selanjutnya setelah uji coba soal adalah validasi soal. Validasi soal dilakukan untuk mengevaluasi hasil pembakuan empiris. Analisis yang dilakukan berkaitan dengan analisis instrument yang sudah diujicobakan.

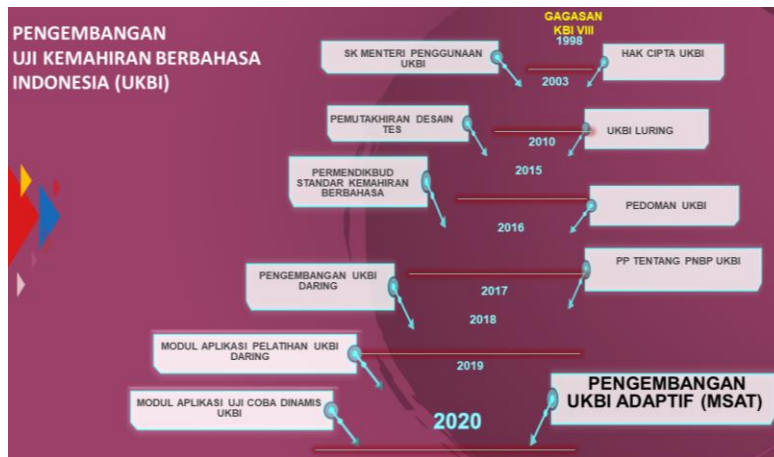
IKK 2.1 “Jumlah instrumen uji kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI)”

Tabel Capaian Kinerja

Baseline Renstra	Tahun 2020			Target Akhir Renstra	Capaian Renstra pada Tahun 2020
	Target	Realisasi	%		
18	4	4	100	40	22

Alur kegiatan penyusunan instrumen UKBI pada tahun 2020 agak berbeda dari alur kegiatan penyusunan standard kemahiran yang sudah dibakukan. Hal itu terjadi karena kejadian “istimewa”, yaitu pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia sejak akhir 2019

dan berdampak terhadap Indonesia mulai Maret 2020. Dengan adanya wabah COVID-19 ini dilakukan berbagai penyesuaian untuk mencapai target yang sudah dirancang, baik penyesuaian anggaran maupun penyesuaian metode kegiatan. Perubahan metode kegiatan dimulai pada pertengahan Maret 2020. Metode kegiatan tatap muka dialihkan menjadi pertemuan daring. Kegiatan yang dilakukan secara daring, di antaranya, adalah rapat-rapat, sidang pembakuan, dan uji coba dinamis UKBI.



Sejarah Perkembangan UKBI

Sejalan dengan itu pula, penggunaan UKBI yang makin luas serta perkembangan teknologi yang makin pesat menuntut dikembangkannya pengujian berbasis internet. Untuk melayani kebutuhan penggunaan UKBI yang makin berkembang, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, memngeluarkan kebijakan target capaian UKBI yang signifikan, yaitu penerapan UKBI Adaptif pada akhir tahun ini.

UKBI Adaptif adalah UKBI dengan sistem pengujian adaptif. Dengan sistem ini, kemahiran peserta UKBI dapat terukur dengan lebih akurat dan efisien karena setiap peserta mengerjakan soal dengan jumlah soal yang berbeda dengan lama waktu pengerjaan yang berbeda pula sesuai dengan tingkat kemahiran berbahasanya. UKBI Adaptif adalah UKBI yang pengujiannya disesuaikan dengan kemahiran berbahasa setiap peserta uji. Penyesuaian itu dilakukan dengan pengembangan aplikasi UKBI Adaptif. Jadi, penyesuaian soal tes dengan kemahiran berbahasa peserta tes dikalkulasikan oleh sistem.

UKBI Adaptif diproyeksikan akan menjadi salah satu alat ukur dalam tes yang diselenggarakan secara massal/nasional, seperti AKM dan UKG. Untuk itu, penyiapan UKBI Adaptif harus dilakukan secara intensif dan optimal.

Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia



Jenis/Bentuk Layanan UKBI

Tahapan sidang pembakuan pada tahun 2020 dilaksanakan selama enam hari yang terbagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama tanggal 27—28 Juli 2020 DKT SP Seksi III Membaca; sesi kedua tanggal 29—30 Juli 2020 DKT SP Seksi II Merespons Kaidah; sesi ketiga tanggal 3—4 Agustus 2020 DKT SP Seksi I Mendengarkan. Untuk keperluan Uji Coba Dinamis UKBI, telah dilaksanakan pula dua sidang pembakuan soal pada tanggal 26—28 Oktober 2020 dan 2—4 November 2020 serta kegiatan validasi soal UKBI pada tanggal 5—7 November 2020.

Uji coba dinamis UKBI merupakan salah satu langkah pembakuan soal yang juga harus mengalami perubahan metode pelaksanaan pada tahun 2020. Uji coba dinamis dilakukan secara daring di 29 provinsi dan 9 negara dengan total 3.006 peserta. Dalam uji coba dinamis, soal UKBI yang diujicobakan berjumlah 1.470 butir soal. Uji coba dinamis UKBI dilaksanakan agar soal UKBI yang akan dianalisis dengan 2 parameter dapat terpenuhi. Soal UKBI yang dinyatakan valid berdasarkan hasil uji coba dinamis akan dimasukkan ke dalam aplikasi UKBI Adaptif.



Pelaksanaan Uji Coba Dinamis UKBI

Uji coba UKBI Adaptif telah dilaksanakan di 11 wilayah, yaitu Bandung, Semarang, Denpasar, Manado, Serang, Padang, Mataram, Pekanbaru, Jakarta, Depok, dan Bogor dalam tiga tahap (tahap pertama 9—12 November 2020, tahap kedua 16—19 November 2020, dan tahap ketiga 29 November—2 Desember 2020) dengan jumlah total 211 peserta. Soal yang diujicobakan dalam uji coba UKBI adaptif berjumlah 1.095 butir soal.

Sasaran UKBI Adaptif / *Multistage Adaptive Test (MSAT)*



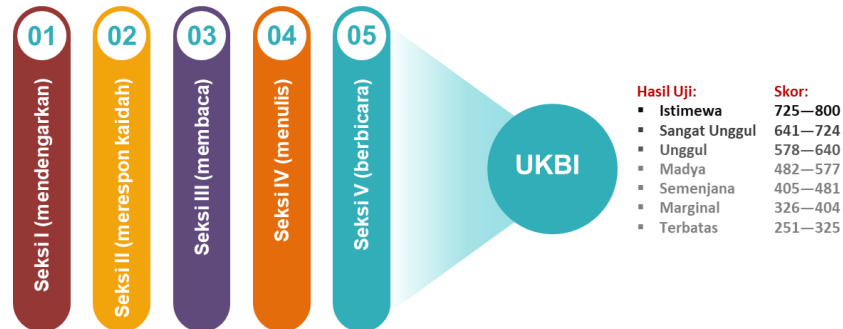
UKBI Adaptif harus dilakukan dengan waktu singkat dalam beberapa tahap berikut:

1. pemantapan soal dalam bank soal UKBI;
2. penentuan teslet (paket soal mudah, sedang, sulit, dan sulit sekali) dengan uji coba empiris (melalui kegiatan Uji Coba Dinamis UKBI);
3. penyiapan aplikasi UKBI Adaptif dan penginputan butir soal ke dalam aplikasi itu; dan
4. pengujicobaan UKBI Adaptif secara empiris.

UKBI Adaptif dapat diwujudkan dengan ketersediaan bank soal, keterlibatan pakar psikometri, dan kerja sama dengan pengembang aplikasi tes bahasa. Sebagai produk yang dihasilkan secara rutin di Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, soal UKBI sudah terhimpun dalam bank soal yang relatif memadai untuk pengujian berskala nasional. Dengan ketersediaan bank soal itu, pengembangan UKBI Adaptif dapat dilakukan dengan relatif cepat. Dengan sistem yang baru, yaitu tes adaptif, butir soal UKBI harus diorganisasikan berdasarkan algoritma khusus. Oleh karena itu, tim UKBI dibantu oleh pakar psikometri yang andal dan terpercaya. Setelah soal UKBI itu ditentukan komposisi butir tesnya, tim UKBI juga dibantu oleh tim pengembang aplikasi tes bahasa untuk menyajikan butir soal secara adaptif.

Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia

Pemeringkatan UKBI



Hambatan/Kendala

Walaupun uji coba soal UKBI (Uji Coba Dinamis UKBI) dilaksanakan dengan sistem daring, uji coba empiris yang ideal sebenarnya lebih efektif dilakukan dengan kehadiran tim UKBI di tiap titik uji coba. Titik uji coba empiris UKBI tentu harus meliputi seluruh wilayah Indonesia secara nasional karena UKBI diproyeksikan akan diterapkan secara nasional pula. Namun, hal itu sulit dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19. Hal ini lah yang menjadi salah satu kendala dalam pencapaian target kinerja tahun 2020.

Langkah Antisipatif

Demi tercapainya target UKBI yang layak guna pada akhir tahun ini dengan penyesuaian bentuk kegiatan pada masa pandemi, uji coba soal UKBI dilaksanakan secara daring. Uji coba soal UKBI (Uji Coba Dinamis UKBI) dilakukan secara daring di 29 provinsi, 8 KBRI, dan di Kantor Learn Indonesian Asia, Singapura.

Sementara itu, untuk uji coba sistem layanan UKBI Adaptif, pemanduan peserta UKBI Adaptif dilakukan secara tatap muka di 11 wilayah, yaitu di Bandung, Semarang, Denpasar, Manado, Serang, Padang, Mataram, Pekanbaru, Jakarta, Depok, dan Bogor. Pemanduan secara tatap muka berdasarkan fakta di lapangan memang diperlukan karena UKBI Adaptif merupakan sistem pengujian yang relatif masih langka di Indonesia.



Inovasi



Tampilan Laman UKBI Adaptif (ukbi.kemdikbud.go.id)

UKBI Adaptif merupakan inovasi dalam penyusunan instrumen UKBI. UKBI Adaptif itu tidak hanya berupa pengalihan media pengujian, dari media berbasis kertas dan pensil ke media komputer dan daring, tetapi juga perubahan sistem pemberian soal kepada peserta tes. Dengan sistem UKBI Adaptif, setiap peserta tes akan mendapatkan jumlah soal yang berbeda dengan waktu pengerjaan soal yang berbeda pula sesuai dengan tingkat kemahiran berbahasanya. Peserta dengan tingkat kemahiran berbahasa yang tinggi diasumsikan akan dapat menjawab banyak soal dengan benar, sementara peserta dengan tingkat kemahiran berbahasa yang rendah diasumsikan hanya dapat menjawab sedikit soal dengan benar. Dengan demikian, UKBI Adaptif dapat mengukur kemahiran berbahasa seseorang dengan lebih akurat dan efisien. Program UKBI Adaptif akan diluncurkan secara resmi pada bulan Januari tahun 2021 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

**PELUNCURAN
UJI KEMAHIRAN
BERBAHASA
INDONESIA (UKBI)
ADAPTIF MERDEKA**
oleh
Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan

Pembicara:
Nedjem A. Makarim
Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan
E. Aminudin Aziz
Kepala
Badan Pengembangan dan
Pelindungan Bahasa

Jumat, 29 Januari 2021
pukul 10.00 – 11.00 WIB

Saksikan siaran langsung secara daring
pada kanal YouTube:
• Kemdikbud RI
• Badan Pengembangan dan
Pelindungan Bahasa

UKBI tes kemahiran berbahasa bagi penutur bahasa Indonesia.

ukbihaw.kemdikbud.go.id | @badanbahasa | @kemdikbud | @kemdikbud

**Rencana
Peluncuran
UKBI Adaptif**

IKK 2.2 “Jumlah acuan kebahasaan dan kesastraan”

Tabel Capaian Kinerja

Baseline Renstra	Tahun 2020			Target Akhir Renstra	Capaian Renstra pada Tahun 2020
	Target	Realisasi	%		
15	3	3	100	46	18

Salah satu tugas utama Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra adalah menyediakan produk acuan/pedoman kebahasaan dan kesastraan yang akan menjadi bahan pembinaan bahasa dalam masyarakat. Di antara berbagai produk acuan/pedoman kebahasaan itu, yang telah ajek dan identik dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa adalah Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (TBBBI).

Isu yang mengemuka terkait dengan TBBBI adalah kegunaannya yang terbatas. Penyajian substansi dalam TBBBI dianggap terlalu berat dan rumit sehingga hanya dapat digunakan oleh kalangan terbatas, yaitu masyarakat yang berlatar belakang pendidikan linguistik. Oleh karena itu, sejak tahun lalu mulai disusun seri tata bahasa praktis. Tata bahasa praktis merupakan penyederhanaan dari Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia sehingga substansi tata bahasa praktis harus mengacu pada Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Seri tata bahasa praktis itu diawali dengan tata bahasa praktis kalimat yang telah mulai disusun pada tahun 2019 dan tata bahasa praktis kata yang disusun pada tahun 2020.



Gambar: Pelaksanaan DKT Penyusunan Pedoman dan Standar Kebahasaan dan Kesastraan dengan Mematuhi Protokol Kesehatan

Untuk menyusun dan menghasilkan Tata Bahasa Praktis Kalimat dan Tata Bahasa Praktis Kata, pada awal tahun 2020 diadakan rapat tim dengan beberapa pakar bahasa di Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk membahas bentuk dan ragangan buku

Tata Bahasa Praktis Kata. Kemudian, naskah Tata Bahasa Praktis Kata disusun oleh tim. Langkah berikutnya adalah memverifikasi naskah yang dibuat dalam kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Pedoman dan Standar Kebahasaan dan Kesastraan. Dalam DKT itu diundang narasumber internal Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan narasumber eksternal dari berbagai perguruan tinggi, instansi, dan organisasi.

Naskah Tata Bahasa Praktis dapat diwujudkan dengan bantuan para pakar dalam Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Pedoman dan Standar Kebahasaan dan Kesastraan. Para pakar telah membantu tim penyusun tata bahasa parktis yang dihadang beberapa keterbatasan. Mereka mengarahkan dan memastikan agar naskah tata bahasa praktis berada dalam koridor yang benar.



Acuan Kebahasaan yang Dihasilkan pada Tahun 2020

Hambatan/Kendala

Penyusunan dan penyelesaian kedua tata bahasa praktis itu dihadapkan pada tantangan yang cukup berat, yaitu target capaian UKBI yang meningkat dan terjadinya wabah pandemi Covid-19.

Produk acuan/pedoman kebahasaan dan instrumen UKBI dikerjakan oleh tim yang sama. Seiring dengan perubahan kebijakan di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, arah target capaian UKBI mengalami perubahan dan peningkatan. Tenaga dan pikiran SDM dalam tim itu terkonsentrasi pada perwujudan target capaian UKBI tersebut. Oleh karena itu, perhatian terhadap pengerjaan tata bahasa praktis, terutama tata bahasa praktis kata, kurang maksimal.

Selain itu, seperti kita ketahui bersama, pandemi Covid-19 memengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan di berbagai instansi, khususnya instansi pemerintah. Dalam pengerjaan tata bahasa praktis, pandemi telah menghambat proses diskusi, baik diskusi internal maupun diskusi dengan para pakar bahasa. Padahal, dalam penyusunan tata bahasa praktis diperlukan rangkaian diskusi yang intensif.

Langkah Antisipatif

Dengan tantangan yang tidak ringan di atas, tim UKBI dan acuan kebahasaan tetap berusaha menuntaskan tata bahasa praktis kalimat dan tata bahasa praktis kata di sela-sela pencapaian target kinerja instrumen UKBI. Selain itu, dalam penyusunan acuan tersebut, Pusat pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra memaksimalkan arahan dan tuntunan dari para pakar terkait, baik dalam model maupun penyajian substansi tata bahasa itu, misalnya bentuk buku yang menyerupai modul (ada soal latihan di dalamnya) dan pencantuman glosarium istilah linguistik disertai istilah yang dikenali oleh awam.

IKK 2.3 “Jumlah bahan ajar kebahasaan”

Tabel Capaian Kinerja

Baseline Renstra	Tahun 2020			Target Akhir Renstra	Capaian Renstra pada Tahun 2020
	Target	Realisasi	%		
82	7	7	100	117	89

Isu-isu strategis berkaitan dengan Bahan Ajar Kebahasaan tahun 2020 yaitu kebutuhan bahan ajar bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) dengan substansi yang beragam, seiring dengan bertambahnya pemelajar BIPA di berbagai belahan dunia. Kebutuhan tersebut diakomodasi dengan cara menyusun Bahan Ajar BIPA sebanyak 7 topik untuk digunakan dalam Pengajaran BIPA di luar negeri. Tujuh topik tersebut yaitu: Kediplomatan, Riset/Penelitian, Kemahasiswaan, Pariwisata, Perbankan, Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia, dan Bisnis.



Produk Bahan Ajar BIPA Tahun 2020

Pengajaran BIPA di luar negeri, selain membutuhkan bahan ajar BIPA dengan materi beragam, juga membutuhkan bahan ajar bahasa asing yang digunakan oleh pengajar BIPA dalam proses pengajaran. Kebutuhan pengajar BIPA yang ditugaskan dalam pengajaran BIPA tersebut juga diakomodasi oleh dengan menyusun bahan ajar bahasa asing sebanyak lima Bahan, yaitu: Bahan Ajar Bahasa Tunisia, Bahan Ajar Bahasa Jerman, Bahan Ajar Bahasa Bulgaria, Bahan Ajar Bahasa Rusia, Bahan Ajar Bahasa Mandarin.



Produk Bahan Ajar Bahasa Asing Tahun 2020

Pencapaian IKK Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan pada tahun 2020, ditunjang oleh terlaksananya kegiatan pada output Bahan Ajar Kemahiran Berbahasa, diantaranya:

- a. penyusunan bahan ajar BIPA;
- b. penyusunan bahan ajar bahasa asing; dan
- c. bahan siaran BIPA.

Faktor lain penunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2020, yaitu adanya pelibatan praktisi BIPA, asosiasi lembaga penyelenggara BIPA, dan akademisi dari perguruan tinggi dalam proses penyusunan materi bahan ajar tersebut, serta pelibatan mahasiswa asing yang pernah belajar di Indonesia dan warga negara asing yang pernah tinggal di Indonesia, dalam penyusunan bahan ajar bahasa asing.

Hambatan/Kendala

Hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian kinerja pada IKK ini yaitu adanya pandemi Covid-19 yang dimulai pada bulan Maret hingga saat ini. Adanya pandemi tersebut menyebabkan tahapan pembahasan draft bahan ajar, baik bahan ajar BIPA dan bahan ajar bahasa asing tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka. Hal tersebut menyebabkan proses penyusunan membutuhkan waktu yang lebih lama dari biasanya.

Langkah Antisipatif

Upaya yang dilakukan oleh tim pelaksana penyusunan bahan ajar yaitu mengubah metode pertemuan untuk pembahasan draf bahan ajar, dari pertemuan secara tatap muka menjadi pertemuan secara virtual. Namun, secara teknis terdapat kendala dalam pelaksanaan, seperti kualitas jaringan internet dan kurang maksimalnya penerimaan materi/substansi dibandingkan pertemuan secara tatap muka. Meskipun demikian, tim penyusun berupaya untuk meminimalkan kendala tersebut sehingga capaian indikator jumlah bahan ajar kebahasaan dapat dipenuhi.

IKK 2.4 “Jumlah rekomendasi kebijakan kebahasaan dan kesastraan melalui penelitian”

Tabel Capaian Kinerja

Baseline Renstra	Tahun 2020			Target Renstra	Capaian Renstra
	Target	Realisasi	%		
4	38	39	102,63	43	43

Beberapa isu strategis dalam penelitian tahun 2020 ini adalah bahwa nilai bahasa Indonesia siswa cenderung rendah, generasi muda cenderung mulai meninggalkan bahasa daerah, penggunaan bahasa Indonesia mulai menggeser penggunaan bahasa daerah, belum pernah ada penelitian bagaimana pemakai memanfaatkan KBBI, dan perlu adanya peninjauan terhadap soal-soal mata pelajaran bahasa Indonesia tentang bagaimana siswa memahami soal-soal yang diberikan kepada siswa. Untuk itu, dilakukan beberapa kegiatan untuk turut menjawab isu-isu tersebut.



Pelaksanaan Penelitian Kelayakan Karya Sastra bagi Siswa

Beberapa kegiatan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. dilakukan penelitian penguasaan kosakata bahasa Indonesia oleh siswa SD—SMA;
- b. dilakukan penelitian sikap bahasa generasi muda terhadap bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing;
- c. penyiapan instrumen penelitian yang sudah dilakukan uji validitas;
- d. penyiapan dan telaah instrumen penelitian yang melibatkan pakar;
- e. prosedur operasional standar penelitian yang telah berjalan dengan baik;
- f. adanya dukungan pimpinan dalam program penelitian;
- g. adanya tuntutan untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas;
- h. proses yang dilakukan sudah teruji melalui SOP yang sudah ditetapkan melalui langkah-langkah penyusunan desain penelitian, penyusunan instrumen penelitian, pengambilan data lapangan penelitian, analisis data penelitian, penyusunan laporan penelitian, dan seminar hasil penelitian.



Daftar Penelitian/Kajian Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra pada Tahun 2020

Hambatan/Kendala

Beberapa kendala/hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan kajian/penelitian pada tahun ini, secara umum akibat terjadinya pandemi Covid-19, yaitu sebagai berikut.

1. Beberapa jenis tes tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena pengumpulan data dilakukan secara daring.
2. Pengerjaan tes tidak dapat diawasi karena tidak dilaksanakan dengan pengawasan guru/peneliti.
3. Data hasil isian responden terlambat sampai ke peneliti. Akibatnya, analisis data juga terlambat (tidak sesuai jadwal).

4. Hasil analisis kurang selengkap hasil analisis pada topik penelitian sejenis karena beberapa data kualitatif tidak diperoleh peneliti. Peneliti juga tidak dapat melakukan teknik observasi partisipatif.
5. Kurang maksimalnya koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian antara berbagai pihak terkait.
6. Waktu pelaksanaan penelitian yang kurang maksimal karena pandemi.
7. Anggaran penelitian hanya sampai daerah pusat.
8. Waktu pelaksanaan tahapan penelitian tidak sesuai dengan jadwal yang telah disusun pada awal tahun.

Langkah Antisipatif

Untuk mengatasi berbagai hambatan/kendala tersebut, tim melakukan beberapa langkah antisipatif sebagai berikut.

1. Akibat kondisi pandemi Covid-19, tim penelitian menyiapkan dua jenis instrumen, (semula hanya satu jenis), yaitu instrumen daring dan instrumen cetak.
2. Tim penelitian berkoordinasi dengan Pusdatin untuk membantu penyiapan instrumen daring.
3. Pengembangan pengambilan data secara daring untuk beberapa jenis penelitian.
4. Pengambilan data lapangan tetap dilakukan untuk pemerolehan data kualitatif dan kelengkapan data, misalnya untuk sekolah-sekolah maupun wilayah-wilayah yang respondennya mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pengumpulan data secara daring.
5. Untuk menunjang pencapaian target supaya diperoleh hasil analisis data yang baik, dilibatkan beberapa narasumber dari beberapa perguruan tinggi.



Pelaksanaan Penelitian Rintisaan Kebangsaan dalam Manuskrip Nusantara di Aceh



Manfaat

Beberapa manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Hasil penelitian penguasaan kosakata bahasa Indonesia oleh siswa SD—SMA di Indonesia akan memberikan deskripsi penguasaan kosakata siswa. Penguasaan yang tidak baik atau terbatasnya penguasaan kosakata siswa memberi pengaruh terhadap hasil belajar siswa.
2. Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami kosakata bahasa Indonesia yang terdapat dalam buku-buku pelajaran atau buku acuan yang digunakan oleh siswa yang disarankan atau dikeluarkan oleh Puskurbuk, demikian juga hasil penelitian kemampuan siswa dalam memahami soal-soal ujian bahasa Indonesia.
3. Guru/pengajar mata pelajaran bahasa Indonesia dapat melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan penguasaan kosakata siswa. Dengan mengetahui kosakata atau pada bagian/aspek mana yang kurang, guru dapat memperbaikinya. Hal yang sama juga dapat dilakukan oleh penyusun buku/kurikulum.
4. Hasil penelitian sikap bahasa generasi muda terhadap bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing dapat digunakan untuk mengetahui daya hidup bahasa. Pada wilayah-wilayah yang generasi mudanya kurang positif terhadap bahasa daerah, dapat dilakukan upaya-upaya untuk menumbuhkan sikap bahasa yang positif dan menghidupkan kembali penggunaan bahasa daerah.
5. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi informasi awal atau kajian lanjutan tentang daya hidup bahasa. Hal ini dimungkinkan karena selain kajian tentang sikap bahasa responden, penelitian ini juga memberikan analisis dan informasi penggunaan bahasa responden, terutama kalangan generasi muda.
6. Menjadi bahan rekomendasi kepada pihak pengampu kebijakan terkait bahan bacaan sastra yang layak bagi siswa.
7. Penguatan nasionalisme di wilayah perbatasan/terluar yang akan tergambar dari jejak sejarah Majapahit pada masa silam.
8. Sastra dapat dijadikan sebagai sarana rekonsiliasi bangsa.

9. Bangsa yang besar senantiasa menghargai dan mengamalkan ajaran leluhur yang dapat terlihat pada rintisan kebangsaan, penelusuran sastra lisan, dan sejarah sastra Indonesia.

Sasaran 3 “Meningkatnya jumlah partisipan aktif dalam pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan”

Meningkatnya jumlah partisipan aktif dalam pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan dicapai dari jumlah lembaga yang terfasilitasi dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, baik lembaga di dalam negeri maupun di luar negeri. Lembaga-lembaga yang terfasilitasi tersebut, antara lain, lembaga penyelenggara program BIPA atau lembaga yang bekerja sama dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, seperti pemerintah dan/atau swasta, organisasi/badan internasional, organisasi profesi, dan komunitas/kelompok masyarakat.

Selain itu pencapaian sasaran ini juga dipenuhi dari penugasan pengajar BIPA untuk luar negeri. Pengajar BIPA tersebut merupakan WNI/WNA yang memenuhi standar kualifikasi akademik, kompetensi pedagogis, profesional, kepribadian, dan sosial, serta wawasan kebangsaan dan diplomasi kebahasaan.

IKK #3.1 “Jumlah lembaga terfasilitasi secara kebahasaan”

Tabel Capaian Kinerja

Baseline Renstra	Tahun 2020			Target Akhir Renstra	Capaian Renstra pada Tahun 2020
	Target	Realisasi	%		
211	112	120	107,14	771	331

Pencapaian indikator jumlah lembaga terfasilitasi secara kebahasaan pada tahun 2020 yaitu sebanyak 120 lembaga.

1. Pelaksanaan Gelar Wicara Tunas Bahasa Ibu pada bulan Februari di Jakarta (1 lembaga).
2. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Bimtek dan Forum Ilmiah BIPA dalam rangka Fasilitasi Ke-BIPA-an melalui Semiloka Pengajaran BIPA IV di Jerman yang diikuti oleh para pengajar dan pegiat BIPA yang berasal dari dalam dan luar Indonesia. Kegiatan



yang dilaksanakan pada 24—26 September 2020 ini dikelola secara virtual dari Jerman melalui media daring.

No.	Lembaga Peserta	Negara
1	Al Barakah School	Inggris
2	BERLITZ Language Center Jakarta	Indonesia
3	Elshinta Consulting UK	Inggris
4	Goethe Universität Frankfurt, VHS	Jerman
5	Goethe-Institut Jakarta	Indonesia
6	Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung	Jerman
7	Universitas Humboldt dan Universitas Leipzig	Jerman
8	Huntingtower School	Australia
9	IKAT Sprachenwerkstatt (Bengkel Bahasa) Hamburg	Jerman
10	KBRI Berlin	Jerman
11	Keio University, Jepang	Jepang
12	KIRI Frankfurt, VHS	Jerman
13	KIRI Hamburg	Jerman
14	La Rochelle Universite, Prancis	Prancis
15	LMU München	Jerman
16	Museum Rudana	Bali
17	Professionelle Sprachlösungen	Jerman
18	Reisehochschule	Swiss
19	School of International Business, Hochschule Bremen	Jerman
20	STIE Malangkeucwara, Malang	Indonesia
21	STKIP PGRI Jombang	Indonesia
22	UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Indonesia
23	UIN Sunan Gunung Diati Bandung	Indonesia
24	Universitas Gadjah Mada	Indonesia
25	Universitas Hamburg	Jerman
26	Universitas Hawaii Manoa Amerika Serikat	Amerika Serikat
27	Universitas London, Inggris	Inggris
28	Universitas Negeri Jakarta	Indonesia
29	Universitas Negeri Semarang	Indonesia
30	Universitas of Naples "L'Orientale" Italia	Italia
31	Universitas Pakuan, Bogor	Indonesia
32	Universitas Passau	Jerman
33	Universitas Richmond	Amerika Serikat
34	Universitas Zurich	Swiss
35	Universität Freiburg	Jerman
36	Universität zu Köln	Jerman
37	VHS Berlin	Jerman
38	VHS Karlsruhe	Jerman
39	VHS Koblenz	Jerman
40	VHS/Tuttlingen	Jerman
41	VHSBS & HBK Braunschweig	Jerman
42	Wisma Bahasa	Indonesia

3. Fasilitasi pengajaran BIPA melalui PJJ BIPA dalam Negeri di Kedutaan Iran, yang diselenggarakan tanggal 14 September--11 Desember 2020 dan diikuti oleh 17 orang peserta yang secara keseluruhan berasal dari Kedutaan Besar Iran di Indonesia (1 lembaga).



4. Festival Handai Indonesia

Festival Handai Indonesia diselenggarakan tanggal 1 September--28 Oktober 2020 dan diikuti oleh 52 lembaga.

No.	Nama Lembaga	Negara
1	Alam Bahasa	Indonesia
2	Alifa Soerianingrat	Indonesia
3	Balai Bahasa Universitas Pendidikan Indonesia	Indonesia
4	BIPA Al-Azhar	Mesir
5	Busan University of Foreign Studies	Korea Selatan
6	Gandhi Memorial International School, Jakarta	Indonesia
7	Guangdong University of Foreign Studies	Tiongkok
8	Indotutors Indonesian Language School di Singapura	Singapura
9	Institut Seni Indonesia Denpasar	Indonesia
10	Jawaharlal Nehru University	India
11	KBRI Dili	Timor Leste
12	KBRI Manila, Filipina	Filipina
13	KBRI Moskow, Rusia	Rusia
14	KBRI New Delhi, India	India
15	KBRI Santiago, Chile	Chile
16	KBRI Vientiane, Laos	Laos
17	Pusat Kebudayaan Indonesia Cairo	Mesir
18	Pusat Studi Indonesia Universitas Terusan Suez	Mesir
19	Pusbudi Nusantara, KBRI Phnom Penh, Kamboja	Kamboja
20	Sam SIFL Samarkand State Institute of Foreign Languages	Uzbekistan
21	Sekolah Bahasa Kementerian Pertahanan Australia	Australian
22	Sekolah Teknik Informatika Dili (ETI)	Timor Leste
23	Tashkent State University of Oriental Studies	Uzbekistan
24	Tianjin Foreign Studies University	Tiongkok
25	Tokyo University of Foreign Studies	Jepang
26	Univeritas Naresuan	Thailand
27	Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta	Indonesia
28	Universitas Andalas	Indonesia
29	Universitas Fatoni	Thailand
30	Universitas Filipina Diliman	Filipina
31	Universitas Gadjah Mada	Indonesia
32	Universitas Indonesia	Indonesia
33	Universitas Internasional Batam	Indonesia
34	Universitas Khartoum	Sudan
35	Universitas Kristen Satya Wacana	Indonesia
36	Universitas Kutai Kartanegara	Indonesia
37	Universitas Lampung	Indonesia
38	Universitas Mae Fah Luang	Thailand
39	Universitas Maejo, Chiang Mai, Thailand	Thailand
40	Universitas Muhammadiyah Malang	Indonesia
41	Universitas Negeri Malang	Indonesia
42	Universitas Negeri St. Petersburg, Rusia	Rusia
43	Universitas Normal Quijing	Tiongkok
44	Universitas Nottingham	Inggris
45	Universitas PGRI Adi Buana Surabaya	Indonesia
46	Universitas Prince of Songkla, Kampus Pattani	Thailand
47	Universitas Sofia (Bulgaria)	Bulgaria
48	Universitas Thammasat	Thailand
49	Universitas Wina, Austria	Austria
50	University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National	Vietnam
51	Uzbekistan State World Languages University	Uzbekistan
52	Xiangsihu College of Guangxi University of Nationalities	Tiongkok



5. Diseminasi Portal BIPA Daring

Fasilitasi lembaga akses diplomasi kebahasaan juga diberikan dalam bentuk Diseminasi Portal BIPA Daring yang diselenggarakan pada tanggal 30 November--9 Desember 2020, yang diikuti oleh 24 lembaga profesional yang menyelenggarakan pembelajaran BIPA di dalam negeri.

No.	Nama Lembaga
1	Institut Agama Islam Negeri Surakarta
2	Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Budi Utomo
3	Institut Teknologi Sepuluh Nopember
4	Mataram Lingua Franca Institute (MALFI)
5	Politeknik Negeri Bali
6	Politeknik Negeri Medan
7	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
8	Universitas Airlangga
9	Universitas Brawijaya
10	Universitas Islam Malang
11	Universitas Islam Negeri Mataram
12	Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali
13	Universitas Mataram
14	Universitas Muhammadiyah Sumatra utara
15	Universitas Muhammadiyah Surakarta
16	Universitas Negeri Medan
17	Universitas Negeri Surabaya
18	Universitas Padjadajaran
19	Universitas Pendidikan Indonesia
20	Universitas Pendidikan Mataram
21	Universitas Surabaya
22	Universitas Udayana
23	Universitas Warmadewa
24	Universitas Sumatra Utara

Hambatan/Kendala

Secara umum hambatan yang dihadapi yaitu adanya pandemi Covid-19 yang dimulai pada bulan Maret hingga saat ini. Adanya pandemi tersebut menyebabkan kegiatan fasilitasi, yang biasanya keseluruhan kegiatan dilaksanakan secara tatap muka menjadi dilakukan secara daring.

Langkah Antisipatif

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan mengubah metode pelaksanaan beberapa kegiatan fasilitasi kebahasaan, dari pertemuan secara tatap muka menjadi pertemuan secara virtual.

IKK #3.2 “Jumlah pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)”

Tabel Capaian Kinerja

Baseline Renstra	Tahun 2020			Target Akhir Renstra	Capaian Renstra pada Tahun 2020
	Target	Realisasi	%		
773	220	221	100,45	1.873	994

Capaian jumlah pengajar BIPA di luar negeri dilaksanakan melalui tiga tahapan kegiatan sebagai berikut.

a) Seleksi Calon Tenaga Pengajar BIPA

Kegiatan Seleksi Calon Tenaga Pengajar BIPA dilaksanakan untuk menjaring tenaga pengajar BIPA yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagai tenaga pengajar BIPA. Penjaringan tersebut meliputi beberapa tahap yaitu: seleksi administrasi, tes psikologi, tes praktik mengajar, wawancara kebijakan, tes kesenian, dan tes bahasa asing. Kegiatan seleksi ini dibagi menjadi dua jenis, seleksi umum, dan seleksi khusus Duta Bahasa.

b) Pembekalan Calon Tenaga Pengajar BIPA

Pembekalan calon pengajar BIPA dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pengajar BIPA yang akan diberangkatkan ke luar negeri sesuai dengan standardisasi pengajar BIPA. Kegiatan pembekalan juga dilakukan untuk menyamakan misi dari calon pengajar BIPA agar terarah pada proses internasionalisasi bahasa Indonesia.

c) Penugasan Tenaga Pengajar BIPA

Penugasan Tenaga Pengajar BIPA dilaksanakan untuk memfasilitasi lembaga-lembaga penyelenggara BIPA yang memerlukan dukungan dan bantuan berupa penyediaan tenaga pengajar dan bahan ajar. Hal ini merupakan bentuk dukungan pemerintah Indonesia terhadap lembaga penyelenggara program bahasa Indonesia di luar negeri. Penugasan pengajar BIPA di luar negeri masa tugas 2020 terealisasi sebanyak 221 penugasan. Pembelajaran BIPA tersebut dilakukan melalui tatap muka (sebelum pandemi covid-19) dan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Sementara itu, jumlah pemelajar yang berpartisipasi sebanyak 8.854 pemelajar yang tersebar di 23 negara.



Tabel Penugasan Pengajar BIPA untuk Luar Negeri Tahun 2020

No	Negara Sasaran	Kawasan	Jumlah Penugasan	Jumlah Pemelajar
1	Thailand	ASEAN 1	1	34
2	Kamboja	ASEAN 1	16	200
3	Laos	ASEAN 1	6	57
4	Filipina	ASEAN 2	3	358
5	Vietnam	ASEAN 2	6	123
6	Australia	ASPASAF	3	184
7	Mesir	ASPASAF	4	32
8	Tunisia	ASPASAF	2	11
9	Inggris	AMEROP	1	6
10	Rusia	AMEROP	1	33
11	Jerman	AMEROP	2	85
12	Austria	AMEROP	3	113
13	Bulgaria	AMEROP	4	52
14	Prancis	AMEROP	5	84
15	Uzbekistan	AMEROP	8	260
16	Polandia	AMEROP	2	39
17	Lokal Timor Leste	ASEAN 2	47	5.020
	Lokal Mesir	ASPASAF	42	460
18	Lokal Papua Nugini	ASPASAF	12	563
19	Amerika Serikat (Program BB-Fulbright FLTA)	AMEROP	28	224
	PJJ Filipina	ASEAN 2	9	400
	PJJ Vietnam	ASEAN 2	4	83
20	PJJ India	ASPASAF	2	191
21	PJJ Uni Emirat Arab	ASPASAF	1	21
	PJJ Thailand	ASEAN 1	2	5
	PJJ Jerman	AMEROP	2	38
	PJJ Uzbekistan	AMEROP	1	34
22	PJJ Italia	AMEROP	1	25
	PJJ Austria	AMEROP	2	102
23	PJJ Yunani	AMEROP	1	17
	TOTAL		221	8.854





Hambatan/Kendala

Terjadinya pandemi covid-19 yang pada tahun 2020, membuat pelaksanaan penugasan pengajar BIPA untuk luar negeri secara langsung ke negara sasaran tidak dapat dilaksanakan karena adanya kebijakan pembatasan dari negara tujuan.

Langkah Antisipatif

Upaya/langkah antisipatif yang dilakukan yaitu dengan memaksimalkan sumber daya tenaga pengajar lokal di beberapa negara sasaran, dan mengubah metode pelaksanaan pengajaran BIPA untuk luar negeri dari semula penugasan secara langsung menjadi pengajaran BIPA melalui daring/virtual. Upaya tersebut merupakan langkah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa agar tetap dapat memberikan layanan pengajaran BIPA bagi lembaga penyelenggara BIPA dan pemelajar BIPA yang ada di luar negeri.



Diskusi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan para Pemelajar BIPA



Inovasi

Inovasi-inovasi yang dilakukan dalam pengembangan program BIPA pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

1) Penugasan pengajar lokal BIPA

Penugasan pengajar lokal BIPA merupakan upaya yang dilakukan guna mengembangkan program BIPA sekaligus memberdayakan pengajar BIPA yang tinggal di luar negeri yang terdiri atas diaspora dan indonesianis untuk melaksanakan pengajaran

bahasa Indonesia bagi penutur asing dan kegiatan diplomasi kebahasaan lainnya. Kegiatan ini telah dilaksanakan di Mesir, Timor Leste, dan Papua Nugini.



Penugasan Pengajar Lokal dalam Pembelajaran BIPA di Mesir

2) Pengajaran jarak jauh BIPA secara daring

Pengajaran jarak jauh BIPA secara daring pada mulanya merupakan upaya yang dilakukan untuk menyikapi dampak dari pandemi Covid-19 yang berakibat penghentian sementara pengiriman tenaga pengajar BIPA ke luar negeri. Pada perkembangannya, kegiatan ini dinilai dapat menjadi *platform* baru program BIPA di masa depan dengan memanfaatkan teknologi termutakhir dalam pengajaran jarak jauh.



Pembelajaran Jarak Jauh BIPA

IKK #3.3 “Jumlah bahan pengayaan laboratorium kebahasaan”

Tabel Capaian Kinerja

Tahun 2020			Target Akhir Renstra	Capaian Renstra pada Tahun 2020
Target	Realisasi	%		
50	50	100	150	50

Pencapaian indikator Jumlah bahan pengayaan laboratorium kebahasaan pada tahun 2020, diperoleh dari:

1. 16 dokumen hasil praktik industri mahasiswa Polimedia, berupa animasi, poster, logo, dan aplikasi;
2. 20 dokumen berupa film animasi cerita rakyat hasil Festival Film Animasi Cerita Rakyat Tahun 2020;
3. 5 dokumen berupa laman dan korpus; dan
4. 9 dokumen hasil kerja tim laboratorium, berupa gim, brosur, dan buku cerita rakyat.



Festival Film Animasi Cerita Rakyat yang Diumumkan melalui Laman Badan Bahasa

Hambatan/Kendala

Secara umum hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian IKK jumlah bahan pengayaan laboratorium kebahasaan pada tahun 2020 adalah sama dengan kendala yang dihadapi pada indikator lainnya, yaitu adanya pandemi Covid-19 yang dimulai pada bulan Maret hingga saat ini. Adanya pandemi tersebut menyebabkan tahapan kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka. Hal tersebut menyebabkan proses penyusunan bahan pengayaan membutuhkan waktu yang lebih lama dari biasanya.

Langkah Antisipatif

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu mengubah metode pelaksanaan kegiatan, dari pertemuan secara tatap muka menjadi pertemuan secara virtual.

Meskipun demikian, secara teknis terdapat kendala dalam pelaksanaannya, seperti kualitas jaringan internet dan kurang maksimalnya materi/substansi yang disajikan untuk bahan pengayaan jika dibandingkan pertemuan secara tatap muka. Namun, tim pelaksana berupaya untuk meminimalkan kendala tersebut, sehingga capaian indikator dapat dipenuhi.

Sasaran 4

“Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah”

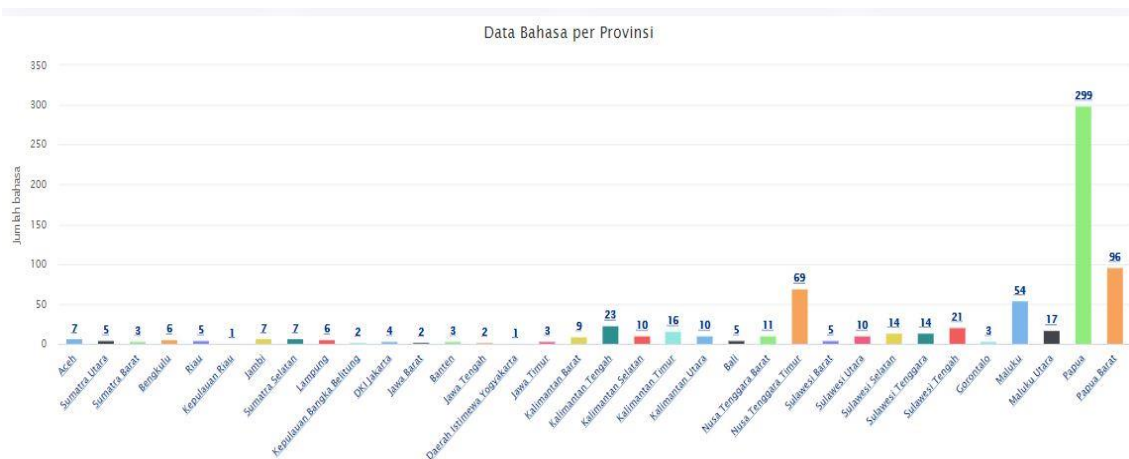
Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya yang sangat banyak, baik warisan budaya benda maupun warisan budaya takbenda. Hal yang dimaksud warisan budaya benda di antaranya artefak, candi, maupun situs, sedangkan warisan budaya takbenda di antaranya bahasa, sastra, mitos, hingga pepatah. Dari banyaknya warisan budaya takbenda, bahasa merupakan salah satu warisan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Melalui bahasa, manusia berkomunikasi dengan dunia, mendefinisikan identitas kelompok, mengekspresikan sejarah dan budaya, belajar, membela hak asasi manusia, dan berpartisipasi dalam semua aspek masyarakat. Selain itu, manusia melestarikan sejarah, adat istiadat dan tradisi, ingatan, cara berpikir, makna, dan ekspresi komunitas juga melalui bahasa.



Kegiatan Ritual Sunnah Hadah di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur

Masyarakat Indonesia patut berbangga karena bahasa daerah di Indonesia memiliki jumlah terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini (Eberhard, dkk, 2019). Hingga tahun 2019, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah mengidentifikasi 718 bahasa daerah dengan total 2.560 daerah pengamatan di seluruh Indonesia. Semakin banyak temuan bahasa teridentifikasi maka semakin banyak pula kekayaan bangsa Indonesia. Jumlah tersebut pun masih dapat bertambah karena belum semua daerah di Indonesia ditelusuri mengingat adanya keterbatasan waktu, biaya, dan sumber daya manusia.

Banyaknya bahasa daerah di Indonesia menjadi landasan pemerintah untuk selalu berupaya menjaga kekayaan negara dengan melakukan pelindungan bahasa daerah. Upaya pelindungan bahasa daerah telah tertuang dalam (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, (3) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan, hingga (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah. Berbagai peraturan tersebut menandakan bahwa bahasa daerah sangat penting untuk dilindungi sebagai salah satu aset kekayaan Indonesia.



Data Bahasa-Bahasa di Indonesia Berdasarkan Persebaran Provinsi

Di sisi lain, jumlah bahasa daerah yang banyak tersebut juga dapat berkurang atau punah. Banyak faktor yang menyebabkan bahasa daerah punah, diantaranya perkawinan berbeda suku, adanya dominasi bahasa tertentu, bahasa daerah tidak digunakan dalam komunikasi sehari-hari secara informal, tidak adanya pengajaran bahasa daerah secara formal, hingga sedikitnya jumlah penutur asli atau bahkan meninggalnya penutur asli bahasa sehingga tidak adanya penutur asli bahasa daerah tersebut. Berkurangnya bahasa daerah dapat diartikan sebagai berkurangnya pula kekayaan Indonesia. Tidak hanya itu, punahnya bahasa daerah juga menandakan punahnya pula nilai, norma, hingga adat istiadatnya. Mengingat begitu besar dampak dari kepunahan bahasa daerah, upaya pelindungan bahasa menjadi penting dan urgen supaya bahasa daerah masih tetap eksis dan digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Dengan begitu, kekayaan bangsa Indonesia juga masih dapat terjaga

sehingga berbagai aspek lain yang mengikuti bahasa itu seperti nilai, norma, hingga adat istiadatnya juga masih dapat terus hidup di masyarakat.

Pelindungan bahasa daerah di Indonesia memiliki beberapa hal yang memengaruhi mulai dari aspek linguistik maupun aspek nonlinguistik. Dari aspek linguistik, pelindungan bahasa daerah di Indonesia memiliki beberapa metode yang beragam. Untuk itu, negara wajib hadir dalam melindungi bahasa daerah di Indonesia supaya metode yang digunakan dapat lebih disesuaikan dengan situasi dan kondisi kebahasaan di Indonesia.

Selain itu, aspek nonlinguistik juga dapat memengaruhi pelindungan bahasa daerah di Indonesia. Hal ini disebabkan banyak faktor eksternal yang membuat bahasa daerah dapat menjadi punah/hilang atau sebaliknya justru malah semakin meningkat. Beberapa faktor tersebut adalah faktor politik, sosial, ekonomi, budaya, hingga hukum. Semua faktor tersebut dapat menyebabkan bahasa daerah menjadi positif atau negatif tergantung dari situasi dan kondisi kebahasaan di daerah setempat.

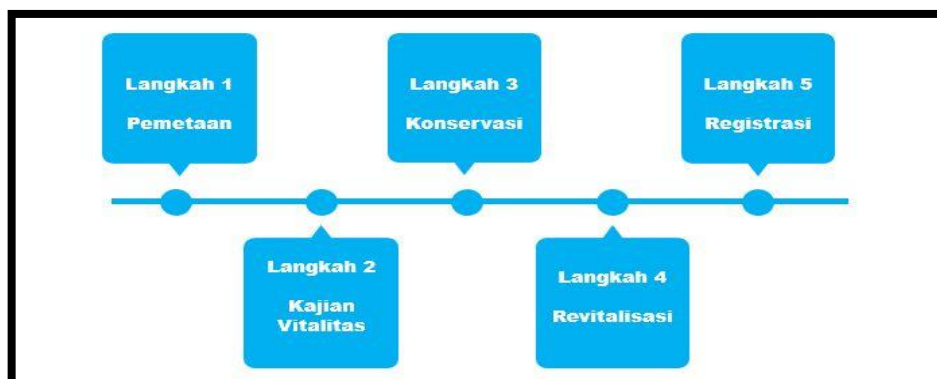
Bahasa daerah dapat semakin meningkat pemakaiannya jika bahasa daerah tersebut dilindungi, baik oleh masyarakat, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat. Sebaliknya, bahasa daerah dapat punah atau hilang jika bahasa daerah tersebut tidak dilindungi dengan baik. Terlebih lagi, adanya arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang semakin lama semakin luas jangkauannya membuat ancaman tersendiri bagi bahasa daerah di Indonesia. Hal ini disebabkan arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi ini membuat jenjang prestise bahasa tersendiri sehingga ada anggapan bahwa bahasa yang populer, baik bahasa Indonesia maupun bahasa asing lebih baik dibandingkan bahasa daerah. Kondisi itu menjadikan pemakaian bahasa daerah menjadi menurun, tidak digunakan, atau malah ditinggalkan penuturnya. Atas dasar tersebut, pelindungan bahasa daerah di Indonesia ini menjadi sangat penting guna mempertahankan, mengembangkan, hingga meningkatkan pemakaian bahasa daerah sebagai salah satu aset kekayaan bangsa Indonesia yang sangat berharga dan tidak ternilai harganya.



Guru SDN Inpres Tobati Mengajarkan Bahasa Tobati kepada Muridnya

Dengan adanya ancaman kepunahan bahasa daerah di Indonesia dan kekayaan takbenda bangsa Indonesia yang masih banyak belum teridentifikasi, mengingat wilayah geografis Indonesia yang sangat luas, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengupayakan pelindungan bahasa daerah di Indonesia. Upaya pelindungan bahasa daerah ini dilakukan dengan beberapa langkah. Mulai dari pemetaan, kajian vitalitas, konservasi, revitalisasi, hingga registrasi bahasa.

Pemetaan bahasa merupakan langkah awal upaya pelindungan bahasa dengan mengidentifikasi dan membandingkan pemakaian penggunaan bahasa di masyarakat sehingga menghasilkan status penggunaan bahasa mulai dari (a) berbeda bahasa, (b) berbeda dialek, (c) berbeda wicara, atau (d) tidak berbeda bahasa. Setelah itu, penggunaan bahasa di masyarakat tersebut dikaji vitalitasnya atau dapat dikatakan ditetapkan status bahasanya mulai dari (i) aman, (ii) rentan, (iii) mengalami kemunduran, (iv) terancam punah, (v) kritis, dan (iv) punah. Selanjutnya, bahasa yang sudah memiliki statusnya direkomendasikan ke dalam dua hal, yaitu konservasi dan/atau revitalisasi. Konservasi lebih kepada penyusunan sistem kebahasaan mulai dari penyusunan sistem fonologi, morfologi, sintaksis, dan sistem aksara. Revitalisasi lebih kepada penggiatan kembali penggunaan bahasa daerah di masyarakat yang dapat dilakukan dengan berbasis masyarakat, komunitas, atau sekolah. Terakhir, bahasa yang telah dilindungi sampai tahapan konservasi dan/atau revitalisasi diregistrasi ke dalam laman <http://regbahasasastra.kemdikbud.go.id/>.



Langkah-langkah dalam Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah di Indonesia

Beberapa langkah tersebut harus dilakukan secara berurutan dan berkelanjutan sehingga membentuk satu rangkaian yang tidak dapat terpisahkan dan saling menguatkan satu sama lainnya. Terlebih lagi, sifat dasar bahasa yang selalu berubah mengikuti perkembangan zaman juga membuat upaya pelindungan bahasa daerah yang telah dirumuskan ini dapat relevan, baik dalam waktu sekarang maupun waktu yang akan datang.

Keberlanjutan menjadi poin penting karena hasil dari upaya pelindungan ini tidak dapat secara langsung dirasakan tetapi bertahap. Hal ini disebabkan upaya pelindungan ini membutuhkan proses dan waktu sehingga perlu dilakukan dengan berkelanjutan supaya dapat secara masif upayanya. Bahkan, upaya pelindungan bahasa ini dapat dilakukan berulang dengan jarak waktu tertentu sehingga karakteristik perubahan bahasanya dapat terlihat atau teridentifikasi.

IKK #4.1 “Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Punah”

Tabel Capaian Kinerja

Baseline Renstra	Tahun 2020			Target Akhir Renstra	Capaian Renstra pada Tahun 2020	Keterangan
	Target	Realisasi	%			
9.000	500	424	84,8	49.000	9.424	Target IKK pada Renstra ini tidak hanya dikerjakan oleh Pusat Pengembangan dan pelindungan Bahasa dan Sastra, tetapi juga dilaksanakan oleh UPT

Berdasarkan isu-isu strategis tahun 2020 dalam pelindungan bahasa daerah di Indonesia, diadakan beberapa upaya untuk melindungi bahasa daerah di Indonesia.

I. Uji Validitas Instrumen Kajian Vitalitas Bahasa



Pelaksanaan Uji Validitas Instrumen Kajian Vitalitas Bahasa di Kampung Betawi Marunda

Pengujian instrumen kajian vitalitas bahasa dilaksanakan sebelum instrumen tersebut disosialisasikan dan digunakan oleh unit pelaksana teknis (balai/kantor bahasa). Hal ini disebabkan instrumen kajian vitalitas bahasa mengalami pemutakhiran, sehingga instrumen termutakhir tersebut masih perlu uji validitas supaya berbagai pemutakhiran instrumen yang masih belum berterima di masyarakat dapat direvisi atau diubah sesuai dengan

pemahaman masyarakat awam. Hasil dari uji validasi instrumen kajian vitalitas bahasa diberikan atau disosialisasikan pada kegiatan Orientasi dan Standardisasi Pelaksanaan Pelindungan Bahasa bersama dengan unit pelaksana teknis (balai/kantor bahasa).

2. Orientasi dan Standardisasi Pelaksanaan Pelindungan Bahasa



Pelaksanaan Orientasi dan Standardisasi Pelindungan Bahasa

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari tahap persiapan bagi pelaksana di UPT sebelum turun ke lapangan. Peserta yang hadir merupakan perwakilan dari balai dan kantor bahasa se-Indonesia yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada balai dan kantor bahasa tentang standar pelaksanaan kegiatan pelindungan bahasa dan sastra yang telah dilakukan oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk menyamakan persepsi, bertukar informasi, sekaligus sebagai bahan evaluasi tentang teknis pelaksanaan kegiatan pelindungan bahasa dan sastra di daerah. Dengan demikian, pelaksana dari balai/kantor bahasa dapat mengatasi berbagai kendala teknis yang telah terjadi sebelumnya sehingga pelaksanaan kegiatan pelindungan bahasa dan sastra se-Indonesia ke depannya dapat berjalan lancar sesuai pedoman dan petunjuk pelaksanaan teknis yang telah ditetapkan.

Dalam kegiatan ini, para peserta yang hadir dibekali materi yang berkenaan dengan praktik baik kegiatan pelindungan bahasa dan sastra, mulai dari pemetaan, kajian vitalitas, konservasi, revitalisasi, hingga registrasi. Pemaparan praktik baik tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran ideal tentang pelaksanaan kegiatan pelindungan bahasa dan sastra. Berbagai hal baik dapat diambil dan dijadikan contoh sehingga balai dan kantor bahasa dapat mengacu pada praktik baik yang telah dilakukan oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra atau mengembangkan praktik baiknya sendiri yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi daerahnya masing-masing.

3. Verifikasi Pemetaan Bahasa



Verifikasi Pemetaan Bahasa di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat

Kegiatan verifikasi pemetaan bahasa merupakan tindak lanjut dari banyaknya fenomena kebahasaan di daerah yang semakin memperlihatkan penguatan identitas kedaerahan, khususnya bahasa setempat yang khas dan tergolong minoritas yang mengarah pada keterancamannya. Ruang lingkup verifikasi pemetaan bahasa ini adalah tingkat kabupaten/kota. Hal ini berbeda dengan kegiatan pemetaan bahasa yang lebih kepada pencarian bahasa yang belum teridentifikasi. Dalam hal ini, verifikasi pemetaan bahasa juga termasuk ke dalam lanjutan dari kegiatan pemetaan bahasa sehingga bahasa-bahasa di Indonesia dapat terdokumentasikan, terpetakan, atau teridentifikasi pada setiap tingkatan kabupaten/kota.

Pada tahun 2020, upaya pelindungan bahasa seharusnya melakukan verifikasi pemetaan bahasa di Sumatra Barat, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan DKI Jakarta. Namun, adanya pandemi Covid-19 yang melanda di seluruh dunia, termasuk Indonesia, membuat pelaksanaan verifikasi pemetaan bahasa ini mengalami perubahan. Terlebih lagi, pandemi Covid-19 yang tidak kunjung membaik dalam tiga bulan pertama dan adanya kebijakan pembatasan perjalanan dinas ke luar Pulau Jawa sehingga daerah pengamatan verifikasi pemetaan bahasa yang berada di luar Pulau Jawa ini pada akhirnya diubah. Berikut daftar kegiatan verifikasi pemetaan bahasa yang telah dilakukan selama tahun 2020.



Verifikasi Pemetaan Bahasa
Tahun 2020

- Bahasa Bugis di Jakarta Utara
- Bahasa Minahasa di Jakarta Utara
- Bahasa Jawa di Jakarta Timur
- Bahasa Madura di Jakarta Timur
- Bahasa Melayu Betawi di Jakarta Selatan
- Bahasa Jawa di Jakarta Selatan
- Bahasa Madura di Jakarta Pusat
- Bahasa Betawi di Jakarta Pusat
- Bahasa Melayu Ambon di Jakarta Pusat
- Bahasa Sunda di Kota Bogor
- Bahasa Melayu Betawi di Kota Bogor
- Bahasa Melayu Betawi di Kota Bekasi
- Bahasa Jawa Banten di Kota Cilegon
- Bahasa Sunda Banten di Kota Serang
- Bahasa Melayu Betawi di Kota Depok
- Bahasa Sunda di Kabupaten Bekasi
- Bahasa Melayu Betawi di Kabupaten Bekasi
- Bahasa Sunda di Kabupaten Pangandaran
- Bahasa Sunda di Kabupaten Kuningan
- Bahasa Jawa di Kabupaten Cirebon
- Bahasa Sunda di Kabupaten Cirebon
- Bahasa Sunda di Kabupaten Indramayu
- Bahasa Jawa Banten di Kabupaten Serang

4. Kajian Vitalitas Bahasa

Kajian vitalitas bahasa menjadi lanjutan dari kegiatan pemetaan bahasa, khususnya bahasa yang sudah teridentifikasi. Bahasa daerah dikaji vitalitasnya dengan hasil penetapan status bahasa, mulai dari (1) aman, (2) rentan, (3) mengalami kemunduran, (4) terancam punah, (5) kritis, dan (6) punah. Dari penetapan status bahasa tersebut, bahasa daerah yang khususnya tergolong terancam punah menjadi prioritas untuk mendapatkan upaya pelindungan selanjutnya, baik dengan konservasi maupun revitalisasi bahasa. Selain itu, kajian vitalitas ini juga menjadi salah satu indikator dari meningkatnya daya hidup bahasa daerah. Dalam pelaksanaannya, kajian vitalitas bahasa terbagi ke dalam tiga tahapan, yaitu persiapan, pengumpulan data, dan pengolahan data. Pada tahap persiapan kajian vitalitas, ada kegiatan pencarian data lokal di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat. Hal ini bertujuan untuk mencari data awal sebagai bahan pendukung sebelum terjun ke lapangan sehingga pada saat pengumpulan data maka pelaksana atau peneliti tidak akan buta terhadap situasi dan kondisi kebahasaan daerah setempat. Terlebih lagi, pengumpulan data di lapangan terbilang sebentar, hanya tujuh hari, jadinya pencarian data lokal akan sangat membantu menelusuri dan menentukan bahasa daerah yang akan dikaji vitalitasnya.

Meskipun demikian, upaya pelindungan bahasa dalam kajian vitalitas bahasa ini hanya dapat dilaksanakan sampai tahap persiapan. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan kajian vitalitas yang sepatutnya mengumpulkan banyak orang (sekitar 100 orang) tidak dapat dilaksanakan lagi.

5. Konservasi Bahasa: Penyusunan Sistem Fonologi, Morfologi, Sintaksis, dan Sistem Aksara

Upaya pelindungan bahasa yang erat kaitannya dengan konsep dokumentasi bahasa selain pemetaan bahasa adalah konservasi bahasa. Hal ini disebabkan konservasi bahasa dalam konteks pelindungan bahasa lebih cenderung kepada penyusunan sistem fonologi, morfologi, sintaksis, dan sistem aksara. Semua penyusunan sistem kebahasaan tersebut sangat berguna mendokumentasikan kekhasan bahasa daerah, terutama bahasa daerah yang memiliki status vitalitas terancam punah. Andaikan bahasa daerah tersebut sudah tidak digunakan lagi oleh masyarakat, setidaknya ada dokumen sistem kebahasaannya sehingga kekayaan takbenda bangsa Indonesia dapat tetap terhitung dan tidak hilang begitu saja.

Sama halnya dengan kajian vitalitas, adanya pandemi Covid-19 dan kebijakan pembatasan melakukan perjalanan dinas ke luar Pulau Jawa mengakibatkan kegiatan konservasi bahasa ini juga tidak utuh dalam tahapannya. Hal ini disebabkan konservasi bahasa memiliki tiga tahapan, yaitu persiapan, pengumpulan data, dan pengolahan data. Tahap persiapan mengarah pada pencarian data lokal di Perpustakaan Nasional. Pengumpulan data mengarah pada terjun ke lokasi penutur bahasa daerah yang hendak dikonservasi dan pengolahan data mengarah pada pembuatan dokumen sistem kebahasaan. Tahap persiapan dalam konservasi bahasa pada tahun 2020 dapat dilaksanakan walaupun tahap pengumpulan data dan pengolahan data tidak dapat dilaksanakan. Sama seperti kajian vitalitas, hasil dari pencarian data lokal ini adalah proposal konservasi bahasa dalam penyusunan sistem kebahasaan. Namun, fokus konservasi hanya dalam dua aspek, yaitu penyusunan sistem fonologi dan penyusunan sistem aksara.

6. Revitalisasi Bahasa

Berbeda dengan konservasi bahasa, kegiatan revitalisasi bahasa lebih kepada melakukan usaha menggiatkan kembali penggunaan bahasa daerah di masyarakat dengan ditandai adanya transmisi atau pembelajaran bahasa daerah penutur muda sebagai generasi penerus. Selain itu, advokasi pelindungan bahasa pada pemerintah daerah setempat juga



menjadi salah satu agenda dalam revitalisasi bahasa mengingat kewajiban pelindungan bahasa daerah dibebankan kepada pemerintah daerah selaku pemilik wilayah dalam Permendagri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah. Tahapannya pun berbeda dengan upaya pelindungan bahasa lainnya. Hal ini disebabkan revitalisasi bahasa memiliki tiga tahapan, yaitu (1) tahapan survei dan koordinasi, (2) tahapan pembelajaran, dan (3) tahapan pertunjukan. Namun, adanya pandemi Covid-19 membuat pelaksanaan revitalisasi bahasa diubah dan tidak dapat dilaksanakan secara penuh. Hal yang dimaksud adalah pelaksanaan revitalisasi bahasa mengubah tahap survei dan koordinasi menjadi pencarian data lokal di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat dengan hasil proposal revitalisasi bahasa sesuai daerah pengamatan yang telah ditetapkan. Tahapan lain dari revitalisasi ini pun tidak dapat dilakukan. Kegiatan revitalisasi ini merupakan kegiatan yang sejatinya dapat melibatkan penutur muda dalam upaya pelindungan bahasa daerah

Dari upaya pelindungan bahasa yang direncanakan, kegiatan verifikasi pemetaan bahasa merupakan satu-satunya kegiatan yang dilaksanakan hingga tahap pengumpulan data, sedangkan kajian vitalitas, konservasi, dan revitalisasi bahasa hanya dilaksanakan sampai tahap persiapan.

Beberapa pelaksanaan kegiatan yang tidak tuntas tersebut, menyebabkan pencapaian keluaran menjadi tidak maksimal karena penggantian daerah pengamatan dari luar Pulau Jawa ke Provinsi Jawa Barat sehingga total pencapaian hanya 23 bahasa dari target keluaran 30 bahasa terlindungi.

Hambatan/Kendala

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam proses pelindungan bahasa adalah tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan secara daring. Hal ini disebabkan upaya pelindungan bahasa mulai dari verifikasi pemetaan, kajian vitalitas, konservasi, dan revitalisasi bahasa melibatkan penutur jati bahasa daerah yang sebagian besar kurang melek teknologi apalagi bahasa daerah yang dipilih biasanya bahasa terancam punah dan kritis yang notabene berada pada lokasi yang sulit dijangkau dan diakses, baik transportasi maupun jaringan internet. Sebagian besar metode pelindungan bahasa dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan mencari dan mendatangi informan yang sekiranya sesuai dengan kriteria. Jika pelaksanaannya dilakukan dengan cara jarak jauh, maka calon informannya masih belum

tentu sesuai kriteria. Calon informan pun biasanya merupakan orang tua yang kurang paham dalam penggunaan teknologi. Selain itu, pola jarak jauh pun menyebabkan susahya menggali informasi dari informan sebab waktu pelaksanaan yang tergolong lama, sehingga informan dapat mudah jenuh dan lelah.

Selain itu, adanya revisi anggaran untuk dialihkan ke penanganan pandemi Covid-19 dan program prioritas lainnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menjadi salah satu permasalahan dalam proses pelindungan bahasa. Hal ini berakibat pada tahapan lanjutan setelah tahap persiapan dalam upaya pelindungan bahasa, seperti kajian vitalitas, konservasi, dan revitalisasi tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Terlebih lagi, lokasi ketiga upaya pelindungan tersebut berada di lokasi yang jauh dari pusat kota.

Di sisi lain, kurangnya sumber daya manusia (SDM) pelindungan bahasa juga turut menjadi salah satu kendala pencapaian target kinerja. Terjadinya pandemi Covid-19 membuat pelaksanaan perjalanan dinas dibatasi dan lebih selektif dalam penugasan dengan memperhatikan usia rentan. SDM berusia 45 tahun ke atas sangat rawan terpapar Covid-19. Hal ini membuat pelaksanaan kegiatan pelindungan bahasa menjadi mundur, terjadinya penggantian daerah pengamatan, hingga ada tahapan yang tidak maksimal dalam pelaksanaannya.



Langkah Antisipatif

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya pelindungan bahasa, langkah antisipatif yang dilakukan adalah melakukan penggantian daerah pengamatan untuk kegiatan verifikasi pemetaan bahasa yang sekiranya dapat dilakukan hingga tahap akhir dan melakukan penyusunan proposal sebagai hasil tahap persiapan yang masih dapat digunakan pada tahun berikutnya. Beberapa daerah pengamatan kegiatan verifikasi pemetaan bahasa yang semula berada di Sumatra Barat, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan DKI Jakarta diubah menjadi Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta dengan tetap berjumlah 15 wilayah tutur bahasa. Pengubahan ini didasarkan pada peluang keterlaksanaannya dan memperhatikan tingkat risiko penularan Covid-19.

Di sisi lain, upaya pelindungan lainnya, seperti kajian vitalitas, konservasi, dan revitalisasi bahasa yang tidak dapat dilanjutkan hingga tahap akhir diusulkan dengan hasil

proposal kegiatan. Hal ini dimaksudkan supaya kajian vitalitas, konservasi, dan revitalisasi bahasa yang sudah dibuat proposalnya masih dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya.

Selain itu, upaya antisipatif lainnya untuk memenuhi target kinerja, dilakukan inovasi dalam pelaksanaan pelindungan bahasa daerah. Tim pelindungan bahasa melaksanakan seri diskusi daring (SDD) pelindungan bahasa daerah.



Inovasi

Terlepas dari berbagai permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, ada beberapa inovasi dalam program pelindungan bahasa daerah. Beberapa inovasi tersebut adalah penyusunan jurnal edisi khusus tahun 2020 dan SDD Pelindungan Bahasa. Kegiatan SDD Pelindungan Bahasa ini menjadi inovasi yang sangat berdampak. SDD Pelindungan Bahasa/Sastra merupakan diskusi daring pertama yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di tengah kondisi pandemi Covid-19. Setelah adanya SDD Pelindungan Bahasa, bermunculan diskusi daring lainnya yang dilaksanakan oleh substansi lain di Badan Bahasa.

SDD Pelindungan Bahasa diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat yang memiliki perhatian dalam upaya pelindungan bahasa daerah. Para penutur muda bahasa daerah pun turut serta dalam upaya pelindungan bahasa daerah ini. Berikut ini daftar kegiatan SDD Pelindungan Bahasa yang diadakan pada tahun 2020.

I. Model dan Tantangan Revitalisasi Bahasa Daerah

SERI DISKUSI DARING
PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA

BADAN BAHASA KEMENDIKBUD
#Sesil
#RembukBahasa

"Model dan Tantangan Revitalisasi Bahasa Daerah di Indonesia"

Pembicara:

- Kurniko Budiono, M.Kom.
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
- Tuhik Sahardjanto, Ph.D.
Indonesia Indonesia

Senin, 11 Mei 2020
pukul 13.00–15.00 WIB
*selas melalui Zoom

Saksikan siaran langsung secara daring pada kanal youtube
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

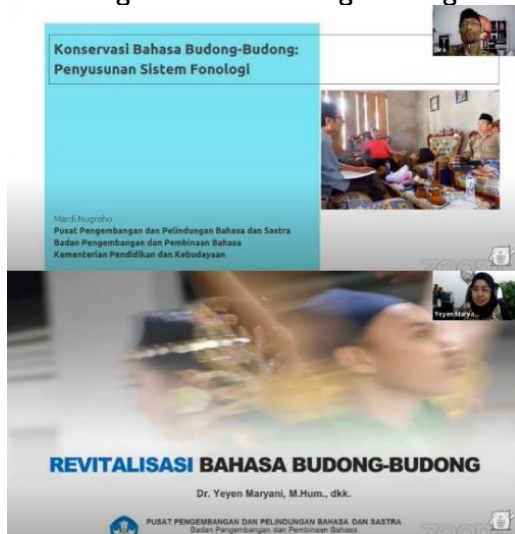
pendaftaran melalui <http://ringkas.kemdikbud.go.id/series1>

Terdapat kelas diskusi akan diberikan melalui pos-el atau whatsapp.
Silakan mengklik kotak masuk atau spam. Serifit akan dikirimi melalui pos-el setelah diskusi selesai.

Peserta terbatas.

Badan Bahasa Kemendikbud | Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

2. Pelindungan Bahasa Budong-Budong di Sulawesi Barat



3. Kajian Vitalitas Bahasa dalam Berbagai Perspektif



4. Pendukung Pembelajaran Bermuatan Lokal di Sekolah

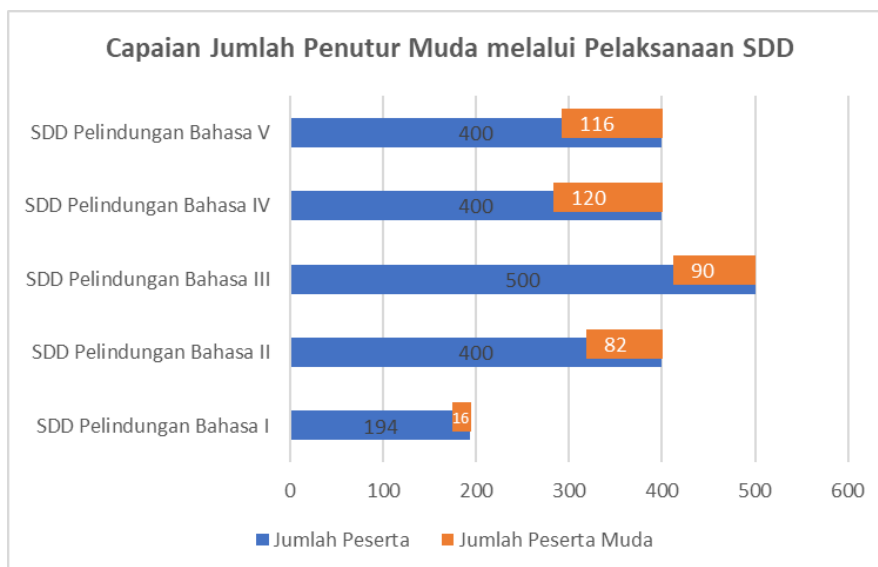




5. Keselarasan Pelindungan Bahasa dan Aspek Budaya



Hasil SDD Pelindungan Bahasa ini dapat menunjang indikator jumlah penutur muda. Hal ini disebabkan revitalisasi bahasa yang biasa dilaksanakantidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19. SDD Pelindungan Bahasa ini turut menggiatkan para penutur muda bahasa daerah dalam upaya pelindungan bahasa daerah. Dalam SDD Pelindungan Bahasa, sebagian besar peserta diskusi merupakan penutur bahasa daerah yang sangat tertarik pada upaya pelindungan bahasa daerahnya, mulai dari penutur muda, dewasa, hingga penutur tua. Berikut ini data jumlah keseluruhan peserta SDD Pelindungan Bahasa beserta dengan klasifikasi jumlah peserta muda sehingga ketercapaian target penutur muda dapat terepresentasikan.



IKK #4.2 “Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah”

Tabel Capaian Kinerja

Baseline Renstra	Tahun 2020			Target Akhir Renstra	Capaian Renstra pada Tahun 2020	Keterangan
	Target	Realisasi	%			
9.000	500	385	77	49.000	9.385	Target IKK pada Renstra ini tidak hanya dikerjakan oleh Pusat Pengembangan dan pelindungan Bahasa dan Sastra, tetapi juga dilaksanakan oleh UPT

Dalam konteks pelindungan sastra daerah ini, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra telah melakukan beberapa kegiatan konservasi dan revitalisasi sastra sebagai upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan sastra agar tetap dipergunakan oleh masyarakat pemiliknya. Upaya pelindungan terhadap sastra lebih diutamakan pada sastra yang mulai kritis karena tidak/jarang dipentaskan/dipertunjukkan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pendokumentasian melalui kegiatan konservasi. Dengan demikian, generasi berikutnya masih dapat menikmati hasilnya.

Kajian vitalitas sastra pun menjadi sangat penting untuk dilaksanakan. Hasil kajian vitalitas sastra dapat digunakan sebagai sarana untuk memantau status sastra (dari yang berstatus aman hingga yang punah), bahan kebijakan pemerintah untuk penetapan status sastra serta implikasinya dalam pemilihan sastra yang diajarkan di sekolah, dan menjadi sumber kebijakan pendidikan bahasa dan sastra.

Untuk peningkatan daya hidup atau vitalitas sastra, dilakukan pula upaya pemelajaran sastra daerah terhadap penutur sastra yang bersangkutan, baik secara klasikal (secara bersama-sama di dalam kelas atau kelompok) maupun pemodelan pada suatu komunitas penutur sastra. Untuk mendukung upaya ini dilakukan penyediaan dokumentasi referensi kesastraan dan penyusunan bahan ajar muatan lokal untuk pemelajaran sastra. Selain itu, juga dilakukan revitalisasi sebagai sarana untuk memperkenalkan sastra daerah kepada generasi muda sekaligus sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat pemilik sastra tersebut untuk terus mengembangkan dan melestarikan sastra yang mereka miliki.

Salah satu strategi yang dilakukan adalah melibatkan UPT dalam kegiatan pelindungan sastra. UPT sangat relevan dalam menjaga sastra sebagai warisan budaya Indonesia. Hal ini sejalan dengan amanat undang-undang terkait tugas daerah dalam melindungi kebudayaan. Hal tersebut juga sejalan dengan wacana pembentukan KKLP Pelindungan Bahasa dan

Sastra yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2021 untuk saling melakukan sinergi dalam pencapaian pelindungan sastra daerah. Strategi lainnya adalah memprioritaskan pelindungan sastra daerah yang mengalami krisis kepunahan.

Pada tahun 2020, dari target keluaran sebanyak 30 sastra terlindungi, dapat terealisasi sejumlah 25 sastra terlindungi. Capaian tersebut diperoleh melalui tiga jenis kegiatan, yaitu pemetaan sastra, konservasi sastra lisan, dan kajian vitalitas sastra. Kegiatan ini dilaksanakan dengan beberapa tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pencarian data lapangan, tahap pengolahan data, tahap pembuatan laporan, dan tahap registrasi.

Kegiatan peta sastra dilaksanakan di 6 wilayah, seperti yang terlihat pada tabel berikut.

WILAYAH PENUTUR SASTRA	SASTRA TERPETAKAN (19 SASTRA)
Kabupaten Cirebon, Jabar	1. Sastra Lisan Macapat 2. Manuskrip Koleksi Bambang Irianto 3. Sastra Cetak Kabar Cirebon
Kabupaten Karawang, Jabar	1. Sastra Lisan Nyayun 2. Manuskrip Teluk Jambe 3. Sastra Cetak Ranggeuyan Sastra Sunda Sampurasun
Kabupaten Pangandaran, Jabar	1. Sastra Lisan Ronggeng Gunung 2. Manuskrip Cijulang 3. Sastra Cetak Langit Hibar di Gili Trawangan (Antologi Puisi)
Kabupaten Sumedang, Jabar	1. Sastra Lisan Nadhar 2. Manuskrip Wawacan Syech Abdul Qodir Djaelani 3. Manuskrip Prabu Siliwangi 4. Sastra Cetak Majalah Sawidak Carita Pondok
Kabupaten Bandung Barat, Jabar	1. Sastra Lisan Kakawihan 2. Manuskrip Lalaguan 3. Sastra Cetak Majalah Mangle
Kabupaten Tegal, Jateng	1. Sastra Lisan Wangsalan Puisi (Wangsi) 2. Sastra Bande 3. Sastra Cetak Dugale Asu Maring Menungsa (Antologi Puisi)



Kegiatan Pemetaan Sastra di Cirebon, Jawa Barat

Kegiatan kajian vitalitas sastra dilaksanakan di tiga wilayah, seperti yang terlihat pada tabel berikut.

WILAYAH PENUTUR SASTRA	SASTRA TERKAJI
Kabupaten Bogor, Jabar	Sastra Lisan Pantun Bogor
Kabupaten Pangandaran, Jabar	Sastra lisan Eok/Beluk
Kabupaten Bandung Barat, Jabar	Sastra lisan Sawer



Kegiatan Kajian Vitalitas Sastra Pantun Bogor di Bogor

Kegiatan konservasi sastra lisan dilaksanakan di tiga wilayah, seperti yang terlihat pada tabel berikut.

WILAYAH PENUTUR SASTRA	SASTRA TERKONSERVASI
Kabupaten Sumedang, Jabar	Sastra Lisan Beluk
Kabupaten Cirebon, Jabar	Sastra Lisan Kecapi Sejarah
Kabupaten Karawang, Jabar	Sastra Lisan Topeng Banjet



Kegiatan Konservasi Sastra Lisan Kecapi Sejarah di Cirebon

Selain kegiatan utama yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa kegiatan pendukung lainnya, antara lain sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Orientasi dan Standardisasi Pelaksanaan Konservasi dan Revitalisasi

Pelaksanaan Orientasi dan Standardisasi Pelaksanaan Konservasi dan Revitalisasi bagi UPT sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman terhadap kerja pelindungan sastra. Pelaksanaan ini dilaksanakan oleh Bidang Pelindungan, Pusbanglin pada bulan Maret 2020 dengan melibatkan beberapa UPT di masing-masing wilayah.



Pelaksanaan Orientasi dan Standardisasi Pelaksanaan Konservasi dan Revitalisasi bagi UPT

2. Lokakarya Pemetaan Sastra

Pelaksanaan lokakarya pemetaan sastra bertujuan untuk memantapkan konsep pemetaan sastra bagi UPT. Acara ini dilaksanakan pada bulan Maret 2020 di tiga wilayah, yaitu Kalimantan Timur, Riau, dan Maluku.



Kegiatan Lokakarya Pemetaan Sastra di Pekanbaru, Riau

3. Sesi Diskusi Daring (SDD)

Bidang Pelindungan selama ini telah melakukan berbagai kajian mengenai bahasa dan sastra daerah yang disosialisasikan melalui seminar hasil dan lokakarya. Pada masa pandemi ini, kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan secara daring dengan nama SDD. Tujuan dari diskusi ini, antara lain:

1. sosialisasi hasil kajian dan kegiatan pelindungan bahasa dan sastra;
2. diskusi isu terkini terkait pelindungan bahasa dan sastra;
3. respon masyarakat terhadap hasil kajian dan kegiatan;
4. umpan balik dari masyarakat sebagai dasar pertimbangan pelindungan bahasa dan sastra selanjutnya; dan
5. membangun jejaring.

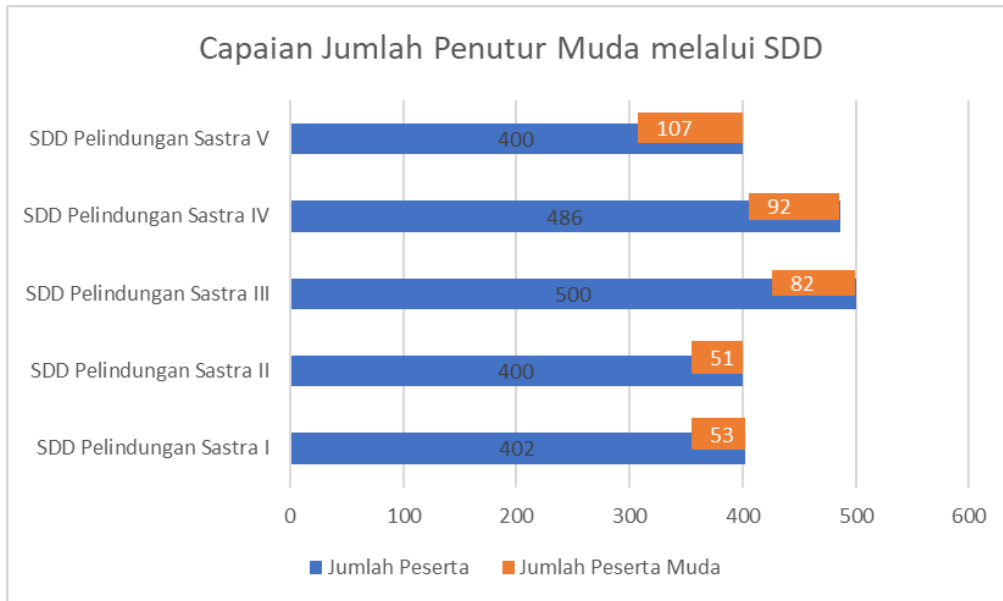
SDD Pelindungan Sastra dilaksanakan sebanyak lima kali, dengan berbagai tema terkait pelindungan sastra daerah, yaitu

1. Revitalisasi Sastra Lisan dan Manuskrip,
2. Pembelajaran Multikultural Melalui Tradisi Lisan,
3. Konservasi dan Revitalisasi: Tarik-Menarik Antara Sastra Lisan dan Tradisi Lisan,
4. Revitalisasi Sastra Lisan dan Cerita Rakyat Melalui Animasi, dan
5. Mengenang Ajip Rosidi: Merawat Bahasa dan Sastra Daerah di Era Global.

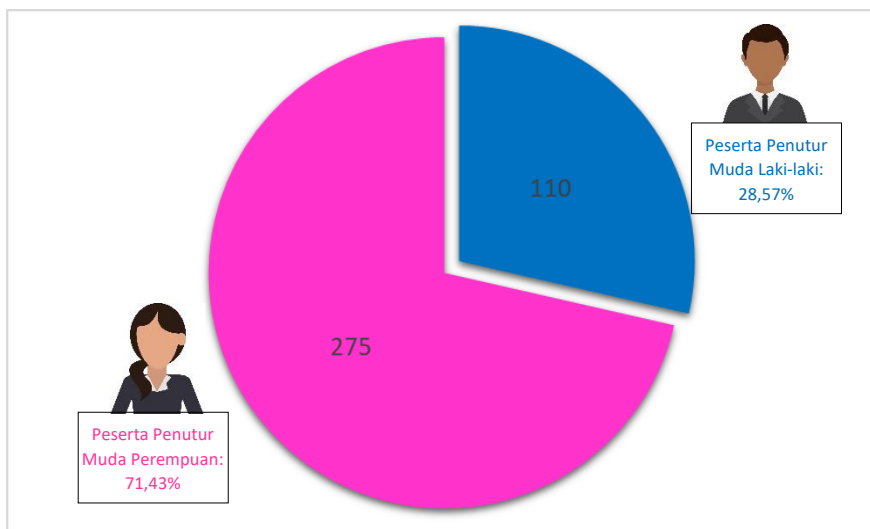


Pelaksanaan SDD Pelindungan Sastra

Antusias terhadap kegiatan SDD Pelindungan Sastra ini sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari jumlah peserta yang hadir dalam acara tersebut yang tergambar pada grafik berikut.



Dari target 500 penutur muda, tercapai 385 orang penutur muda yang diperoleh dari kegiatan SDD. Pada kegiatan SDD Pelindungan Sastra tersebut, dipaparkan dan diperkenalkan beberapa kegiatan dari pelindungan sastra daerah kepada khalayak umum, khususnya kepada generasi muda. Kegiatan ini sebagai pemantik kepada masyarakat umum agar peduli dan melestarikan beberapa sastra daerah yang terancam punah. Dari jumlah 385 orang penutur muda yang terlibat dalam pelindungan sastra melalui seminar diskusi daring pelindungan sastra tersebut, diperoleh informasi bahwa 71,43% dari penutur muda tersebut berjenis kelamin perempuan dan 28,57% berjenis kelamin laki-laki.



Jumlah Peserta Penutur Muda pada SDD Pelindungan Sastra

Hambatan/Kendala

Tidak terpenuhinya target disebabkan oleh karena beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan, seperti kegiatan kajian, konservasi, dan revitalisasi. Faktor yang menjadi penyebab kegagalan pelaksanaan kegiatan dikarenakan adanya pelarangan mengumpulkan banyak orang (akibat pandemi Covid-19) yang mengakibatkan sebagian besar kegiatan pelindungan yang membutuhkan orang banyak sebagai objek kegiatan/kajian terkendala untuk dilaksanakan.

Sebagian besar kegiatan dan kajian pelindungan sastra daerah tidak dapat dilakukan secara daring karena sifat proses pengumpulan data kegiatan pelindungan sastra bersifat observasi secara langsung. Revitalisasi sastra tidak bisa dilaksanakan secara daring karena mengumpulkan banyak orang yang sifat kegiatannya adalah partisipan langsung dalam bentuk pelatihan dan pementasan. Adanya pelarangan kegiatan yang bersifat tatap muka juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan. Ketika ada kelonggaran untuk melaksanakan kegiatan tatap muka pada semester kedua, hal itu sangat sulit karena kurangnya waktu untuk melaksanakan kegiatan. Kegiatan revitalisasi dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu koordinasi, pelatihan, dan pementasan. Dengan rangkaian kegiatan tersebut, tidak memungkinkan kegiatan revitalisasi dilaksanakan dalam waktu yang sangat singkat.

Kendala lain adalah kurangnya sumber daya manusia untuk melaksanakan kegiatan pelindungan sastra. Selain itu, terpecahnya konsentrasi tim pelindungan sastra dengan adanya program baru KKLK yang membuat tenaga, waktu, dan pikiran dalam melaksanakan kegiatan pelindungan harus terbagi dengan program baru tersebut.

Belum maksimalnya koordinasi Pusat dengan UPT terkait kegiatan pelindungan bahasa dan sastra yang dilaksanakan di balai dan kantor bahasa juga menjadi salah satu kendala ketercapaian target kinerja. Permasalahan lain di daerah yaitu kurangnya kepedulian pemerintah/pegawai daerah terhadap pentingnya bahasa/sastra di daerah dan kurangnya minat kaum muda terhadap bahasa/sastra di daerahnya.

Langkah Antisipatif

Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

- a. melakukan revisi anggaran dengan mengurangi beberapa daerah pengamatan dan mengganti daerah pengamatan beberapa kegiatan pelindungan sastra dengan daerah yang dapat terjangkau selama pandemi;
- b. melakukan kegiatan daring melalui kegiatan SDD untuk memperkenalkan kepada masyarakat umum tentang kegiatan pelindungan sastra;
- c. peningkatan peran seluruh balai/kantor bahasa dalam melaksanakan kegiatan pelindungan bahasa dan sastra;
- d. peningkatan peran instansi pemerintah daerah, seperti Bappeda, Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dewan Kesenian/Kebudayaan, dan komunitas masyarakat yang bergerak dalam kebahasaan dan kesastraan pada umumnya untuk membangun sinergitas antara pusat dan daerah dalam pelindungan bahasa dan sastra yang diusung oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra;
- e. melakukan pertemuan atau diskusi secara lebih mendalam dan terperinci dalam hal teknis pelindungan bahasa dan sastra di daerah sehingga upaya pelindungan bahasa dan sastra menjadi gerakan yang utuh serta melibatkan komponen pemerintah daerah dan masyarakat sebagai pemilik bahasa dan sastra daerah; dan
- f. peningkatan pemahaman konsep pelindungan bahasa dan sastra daerah agar ada kesepahaman antara pemerintah pusat dan daerah terkait konsep pelindungan bahasa dan sastra daerah.



Inovasi

Inovasi yang dilakukan selama masa pandemi ini adalah melakukan diskusi daring terkait program pelindungan sastra. Peserta SDD berasal dari berbagai instansi dan penggiat bahasa dan sastra daerah seluruh Indonesia dengan kelompok usia yang beragam.

Inovasi lainnya adalah pembuatan film dokumenter kegiatan konservasi sastra lisan.



Kegiatan Konservasi Sastra Lisan di Sumedang, Jawa Barat

Kegiatan pelindungan sastra dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak atau lembaga yang terkait pada pelindungan sastra. Hasil kegiatan ini dapat dimanfaatkan oleh petugas yang menangani bidang pelindungan, baik di Pusat maupun di balai/kantor bahasa serta pemerintah daerah di dalam menyusun kegiatan pelindungan sastra daerah.

Pada tataran akademis, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa juga perlu mendukung pembukaan program studi bahasa dan sastra daerah pada perguruan tinggi di daerah untuk mengatasi keterbatasan ketersediaan pengajar bahasa dan sastra daerah.

Kegiatan SDD yang mengupas tentang kegiatan pelindungan bahasa dan sastra sangat bermanfaat bagi para mahasiswa khususnya mereka yang mengambil jurusan bahasa dan sastra. Melalui kegiatan ini, mereka dikenalkan beberapa kajian dan wawasan yang menarik berkaitan dengan bahasa dan sastra. Bagi pihak lainnya, kegiatan SDD juga bermanfaat untuk menjalin kerja sama dalam melaksanakan program pelindungan bahasa dan sastra. Selain itu, kegiatan pelindungan sastra sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk memantik mereka dalam melakukan kegiatan yang sama dalam upaya pelindungan bahasa dan sastra daerah.

IKK #4.3 “Jumlah Produk Kesastraan Berkembang”

Tabel Capaian Kinerja

Baseline Renstra	Tahun 2020			Target Akhir Renstra	Capaian Renstra pada Tahun 2020
	Target	Realisasi	%		
2	4	4	100	22	6

Isu strategis terkait pengembangan sastra pada tahun 2020 adalah terkait kritik sastra dan alih wahana karya sastra. Isu-isu tersebut muncul karena ada kegelisahan terkait perkembangan kesastraan yang ada di Indonesia akhir-akhir ini. Sastra nasional atau sastra kontemporer belum banyak diidentifikasi dan diklasifikasikan menurut kajian-kajian mendalam. Atas dasar itulah kedua isu strategis tersebut diambil untuk menjadikan sastra Indonesia berkembang ke arah yang lebih baik.

Salah satu proses dalam pengembangan sastra yaitu kritik sastra. Kritik sastra merupakan media yang menghubungkan antara sastrawan dengan penikmat sastra untuk memahami karya sastra dengan lebih dalam. Pendapat yang dituliskan melalui kritik sastra

dapat meningkatkan dan mengembangkan kualitas karya sastra. Dengan demikian, kritik sastra merupakan aspek penting yang dapat memengaruhi pengembangan sastra.

Seiring dengan berkembangnya dunia digital, makin berkembang pula hasil karya sastra masyarakat. Namun, hal ini tidak diiringi dengan berkembangnya dunia kritik sastra. Dengan program kritik sastra ini diharapkan dapat mengatasi ketidakseimbangan antara pertumbuhan cipta sastra dengan kritikus sastra. Selain itu, program kritik sastra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa juga bertujuan untuk memajukan kritik sastra Indonesia.

Untuk menunjang kegiatan kritik sastra tersebut, dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut.

a. Kuliah Daring Kritik Sastra

Dua kali kuliah daring dilaksanakan pada bulan Juli dan dua kali kuliah lainnya dilaksanakan pada bulan September.



Pelaksanaan Kuliah Daring Kritik Sastra

Kuliah daring kritik sastra dilakukan melalui aplikasi zoom sekaligus disiarkan secara langsung melalui kanal youtube Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

b. Sayembara Kritik Sastra

Sayembara kritik sastra diadakan untuk menarik minat masyarakat dalam membuat kritik sastra. Sayembara kritik sastra tingkat nasional juga mempunyai tiga fungsi pokok, yaitu memotret kondisi kritik sastra Indonesia, sebagai ajang memamerkan keragaman ekosistem kritik sastra Indonesia, dan menetapkan tolok ukur sementara atas perjalanan kritik sastra Indonesia terkini.

Rangkaian kegiatan ini terdiri dari pendaftaran peserta, seleksi naskah, penilaian dewan juri, dan yang terakhir pengumuman pemenang sayembara kritik sastra. Sementara itu, tim juri yang bertugas menyeleksi naskah kritik sastra yang dikirim oleh peserta, yaitu

Manneke Budiman, Mu'jizah, Seno Gumira Ajidarma, Sastri Sunarti, dan Yoseph Yapi Taum.



Poster Sayembara Kritik Sastra

c. Penyusunan Antologi Kritik Sastra

Penyusunan buku Antologi Kritik Sastra bertujuan untuk meningkatkan minat penulisan kritik sastra di masyarakat dan sebagai penghargaan atas penulisan naskah kritik sastra yang telah dinilai oleh pakar sastra sebagai naskah terbaik dan terpilih untuk dibukukan.



Buku Antologi Kritik Sastra

Antologi Kritik Sastra berisi 20 naskah terbaik kritik sastra hasil Sayembara Kritik Sastra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020. Kedua puluh kritik sastra tersebut dipilih oleh para juri yang terdiri atas sastrawan, akademisi, dan para peneliti sastra.

Selain capaian Buku Antologi Kritik Sastra, capaian berikutnya adalah Ensiklopedia Sastra. Ensiklopedia Sastra Indonesia merupakan salah satu produk Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang menjadi acuan masyarakat Indonesia, baik masyarakat umum maupun kalangan tertentu, seperti akademisi dan praktisi bahasa dan sastra. Ensiklopedia dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengetahui tokoh-tokoh bahasa dan sastra Indonesia, peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan bahasa dan sastra Indonesia, serta informasi lain tentang perkembangan bahasa dan sastra Indonesia.



Tampilan Ensiklopedia Sastra Indonesia Daring

Ensiklopedia Sastra Indonesia bisa diakses secara daring pada laman ensiklopedia.kemdikbud.go.id. Pada tahun 2020 ini, Penyusunan Ensiklopedia Sastra memfokuskan kegiatannya pada revisi/penyuntingan 441 artikel. Aktivitas tersebut dilakukan dengan tahapan penyuntingan data, pengunggahan data hasil revisi, dan pelaporan.

Ketercapaian kinerja yang berikutnya adalah program alih wahana karya sastra. Kegiatan ini merupakan kegiatan pengalihan karya sastra yang sudah ada ke dalam bentuk lain, seperti film, animasi, atau komik yang akan memudahkan masyarakat dalam memahami dan mengapresiasinya. Pada tahun 2020, dilakukan pemilihan bahan, penentuan bentuk wahana baru, pemilihan narasumber sastra, dan pembuat wahana tersebut.



Gambar Video Animasi Demang Pancal Panggung dan Nini Mita

Alih wahana yang dilakukan adalah pengalihwahanaan dari cerita rakyat menjadi film animasi tiga dimensi. Cerita rakyat yang dialihwahanakan pada tahun 2020 yaitu cerita Demang Pancal Panggung dan Nini Mita.

Kegiatan lainnya yang dilakukan untuk mencapai target pengembangan sastra yaitu adanya pusat data sastra yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mengolah data sastra yang sudah ada untuk diinformasikan kepada masyarakat agar data tersebut dapat lebih mudah diakses dan diapresiasi. Pada tahun 2020, dilakukan pengumpulan data, penyeleksian data, dan penentuan bentuk media pusat data tersebut.

Hambatan/Kendala

Hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain sebagai berikut.

- a. Terjadinya pandemi Covid-19 menyebabkan tim pengembangan sastra tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan secara tatap muka sehingga hasil kerja menjadi kurang maksimal.
- b. Kurangnya sumber daya manusia yang berkualifikasi untuk menyusun ensiklopedia sastra.
- c. Kurang maksimalnya komunikasi dalam tim kerja pengembangan sastra.

- d. Belum tersedianya sumber daya manusia berkualifikasi dalam dunia penyuntingan.
- e. Terpecahnya konsentrasi tim pengembangan sastra karena adanya KKLK. Beberapa KKLK sudah mulai aktif sehingga anggota KKLK mulai berkegiatan dan bekerja pada KKLK yang baru sehingga tidak bisa fokus hanya pada kegiatan yang ada di pengembangan sastra.

Langkah Antisipatif

Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Bekerja sama dengan pengembang yang memenuhi kualifikasi dan memiliki kompetensi yang baik agar produk alih wahana karya sastra dapat diselesaikan.
- b. Mengadakan koordinasi kegiatan melalui rapat daring sehingga kegiatan bisa tetap terlaksana.
- c. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan lainnya secara daring.
- d. Peningkatan koordinasi internal.



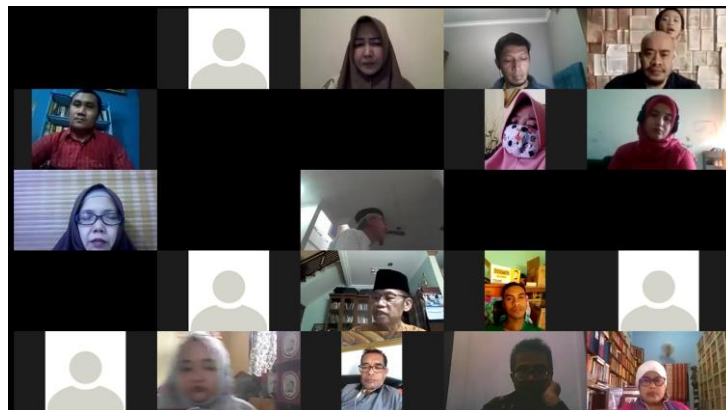
Inovasi

Terjadinya pandemi Covid-19 membuat beberapa kegiatan tidak bisa maksimal dilaksanakan. Oleh karena itu, dilakukan suatu inovasi dengan mengadakan kegiatan Seri Diskusi Daring (SDD). Wujud kegiatan ini berupa kegiatan membedah buku-buku sastra dan membahas penelitian-penelitian sastra bersama para narasumber yang kompeten pada bidangnya. Kegiatan Bedah Buku Sastra ini bertujuan untuk mengenalkan kegiatan-kegiatan kebahasaan dan kesastraan Badan Bahasa secara daring kepada masyarakat Indonesia di tengah pandemi Covid-19.



Seri Diskusi Daring Pengembangan Sastra

SDD Pengembangan Sastra dilakukan sebanyak delapan kali. Dalam setiap sesi SDD, terdapat dua narasumber dengan jumlah peserta setiap sesi sekitar 200--300 peserta. Kegiatan ini dilakukan secara virtual melalui aplikasi *zoom* dan disiarkan secara langsung melalui kanal *youtube* Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.



Seri Diskusi Daring Bedah Buku Sastra "Karang Menghimpun Bayi Kerapu"

Sasaran 5

"Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa"

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat utama dalam pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat memengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.

Upaya perbaikan tata kelola pemerintah dilakukan dengan mencari paradigma terbaik yang dapat dipraktikkan di lapangan. Secara umum, Indonesia mengarah pada praktik paradigma *new public management*, yang ditunjukkan dengan upaya menciptakan efektivitas, efisiensi, dan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, serta *new public service (governance)* yang ditunjukkan dengan keterlibatan aktor lain di luar pemerintah dalam kedudukan yang sama, seperti masyarakat sipil, dunia usaha, dan media masa.

Hasil yang diharapkan dari penciptaan tata kelola yang baik melalui reformasi birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan tersebut yaitu dengan cara peningkatan sistem akuntabilitas kinerja dan peningkatan kinerja anggaran atas pelaksanaan anggaran.

IKK #5.1 “Predikat SAKIP Satker minimal BB”

Berdasarkan Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tabel Capaian Kinerja

Tahun 2019	Tahun 2020			Target Renstra	Capaian Renstra pada Tahun 2020
	Nilai SAKIP	Target	Realisasi		
A	BB	A	112	BB	A

Target nilai SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dapat tercapai, bahkan melampaui target. Ketercapaian nilai/predikat SAKIP ini ditunjang oleh beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu:

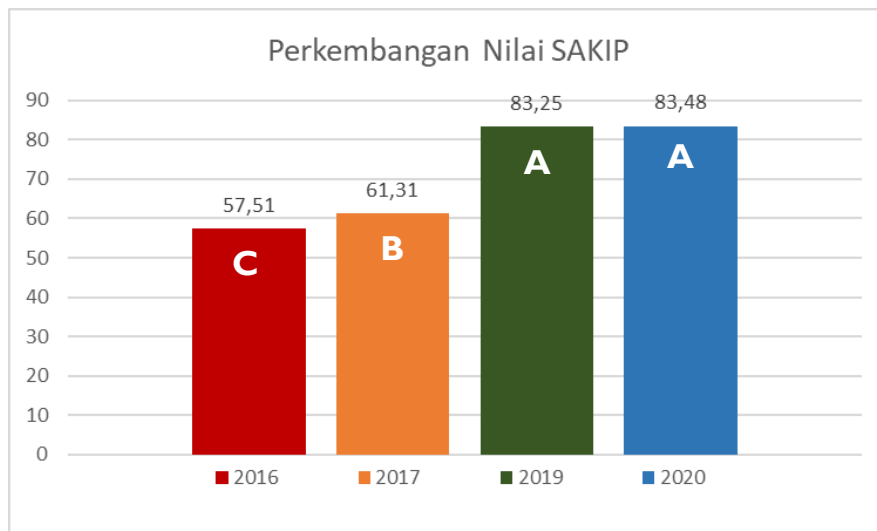
1. pembahasan draf Renstra Badan Bahasa Tahun 2020—2024 dengan memperhatikan permasalahan pada Renstra 2015—2019 (khususnya yang terkait dengan tugas Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra);
2. penyusunan Rencana Kinerja Tahunan;

3. Penyusunan perjanjian kinerja Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, koordinator, serta pegawai;
4. pengukuran kinerja yang dilakukan, baik setiap bulan maupun triwulan;
5. penyusunan laporan kinerja; dan
6. pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja tahun 2020



Kegiatan Evaluasi Kinerja Tahun 2020

Selain adanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tersebut, terdapat beberapa faktor yang turut mendukung tercapainya predikat SAKIP, yaitu dibentuknya tim pelaporan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, adanya SOP pelaporan kinerja dan penyusunan laporan kinerja, SDM SAKIP yang sudah mengikuti Diklat SAKIP, dan adanya komunikasi yang terjalin antaranggota tim pelaporan dan pihak terkait lainnya.



Hambatan/Kendala

Sementara itu, hal-hal yang menjadi kendala dalam ketercapaian predikat SAKIP, yaitu terjadinya perubahan struktur organisasi di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Renstra 2020—2024 yang baru selesai disusun dan terbit pada pertengahan tahun 2020, perjanjian kinerja yang baru ditandatangani pada bulan Agustus 2020 (menunggu proses penyusunan Renstra), kurangnya pemahaman dan perhatian akan pentingnya implementasi SAKIP pada suatu instansi, dan kurang maksimalnya pelaksanaan koordinasi pada masa pandemi Covid-19.

Langkah Antisipatif

Dalam rangka mengatasi kendala-kendala tersebut, dilakukan beberapa langkah antisipatif, yang meliputi peningkatan komunikasi dan koordinasi, baik di lingkungan internal maupun koordinasi dengan pihak eksternal, seperti Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Biro Perencanaan, Kemenpan dan Reformasi Birokrasi, Direktorat Jenderal Anggaran, dan instansi terkait lainnya. Keikutsertaan staf dalam bimbingan SAKIP yang dilakukan oleh Sekretariat Badan Bahasa atau Biro Perencanaan pun menjadi salah satu upaya dalam rangka mengatasi kendala-kendala tersebut. Selain itu, upaya sosialisasi mengenai pentingnya SAKIP pun dilakukan kepada internal Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, senyampang dengan pelaksanaan kegiatan Evaluasi Kinerja Tahun 2020. Di samping itu, pengisian dokumen SAKIP dalam aplikasi terkait SAKIP dan pemantauan kinerja (esr menpan dan e-kinerja serta aplikasi pelaporan lainnya) diupayakan agar dapat diisi sesuai periode waktu pengisiannya.

eKinerja 2020 | Peraturan | Perjanjian Kinerja | Rencana Aksi | Pengukuran

INFO SATKER

No	Nomorkiatur	Uraian
1.	Unit Eselon 1	BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA [13]
2.	Satker	PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA [13.00.419007]
3.	Kepala Satker	Dora Amalia (plt. Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra) Edit
4.	Alamat Kantor	Jl. Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur Edit
5.	Alokasi(DIPA 0)	Rp. 32.545.269.000,- Blokir Rp. 0,-
6.	Alokasi(Saat Ini)	Rp. 38.244.200.000,- Blokir Rp. 0,-

Progres Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan Capaian Triwulan

No	Tahapan	Status
1	Perjanjian Kinerja	Disetujui
2	Rencana Aksi	selesai
3	Capaian Triwulan 1	selesai
4	Capaian Triwulan 2	selesai
5	Capaian Triwulan 3	selesai
6	Capaian Triwulan 4	Selesai

e-SAKIP REVUI

Dashboard

Search: pusat pengembangan d

OPD	Renstra	IKU	PK	Laporan Kinerja	Lainnya
Pusat Pengembangan dan Pelindungan	✓	✓	✓	✓	

Showing 1 to 1 of 1 entries (filtered from 402 total entries)

Partisipasi pada Pengisian Apalikasi E-kinerja dan ESR Kemenpan

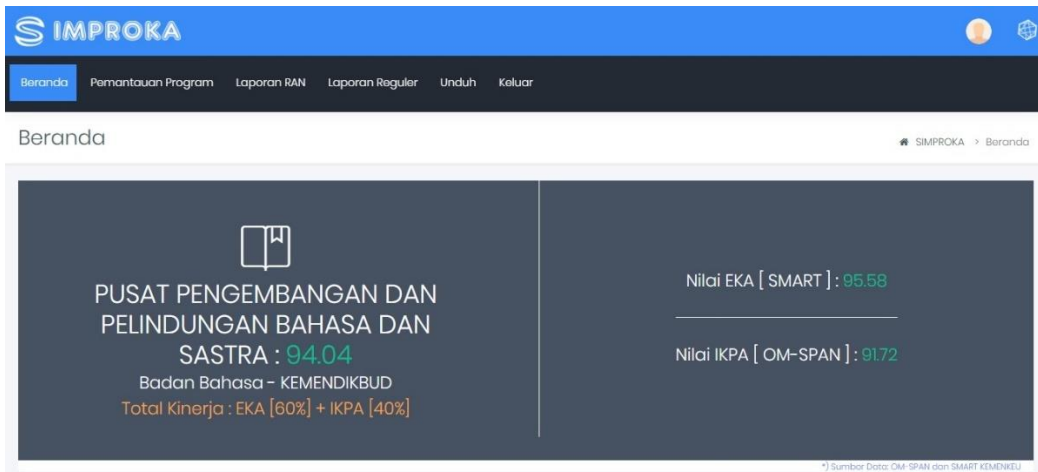
IKK #5.2 “Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L satker minimal 91”

Tabel Capaian Kinerja

Nilai pada Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra	Capaian Renstra pada Tahun 2020
	Target	Realisasi	%		
92,54	91	94,04	103	95	94,04

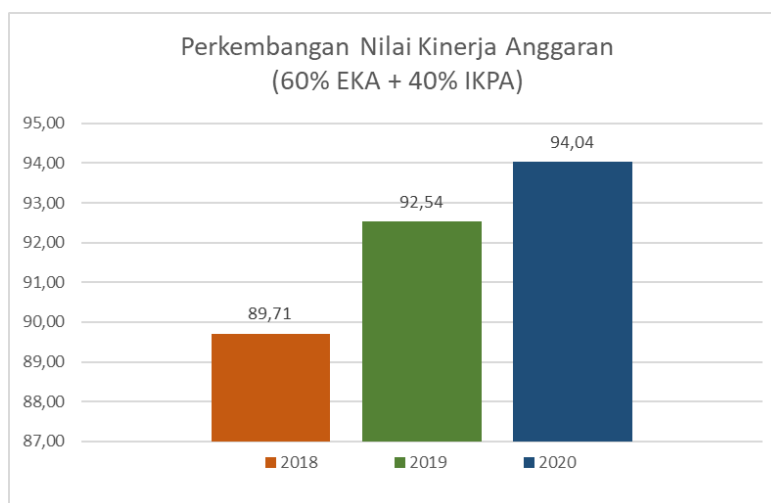
Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan

efisiensi pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.



Nilai Kinerja Anggaran pada Aplikasi Simproka

Faktor-faktor pendukung dalam pemerolehan nilai kinerja anggaran yaitu adanya pembentukan tim penyusun anggaran dan tim pelaporan, pembentukan tim pengelola keuangan, pembentukan tim pengadaan barang dan jasa, pemantauan ketercapaian realisasi anggaran dan capaian keluaran, baik melalui rapat, koordinasi, komunikasi, maupun melalui pengisian berbagai aplikasi keuangan dan/atau pelaporan, serta pelaksanaan pengelolaan anggaran dengan mengacu pada ketentuan dan indikator-indikator kinerja anggaran.





Hambatan/Kendala

Hambatan/permasalahan yang memengaruhi tercapainya target nilai kinerja anggaran yaitu adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, adanya penggabungan anggaran dari satker Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan kepada Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan jadwal, lokasi, dan metode pelaksanaan kegiatan, kurangnya koordinasi antara tim penyusun anggaran, tim pelaporan, dan tim pengelola keuangan serta tim teknis pelaksana kegiatan, serta kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya nilai kinerja anggaran suatu instansi.

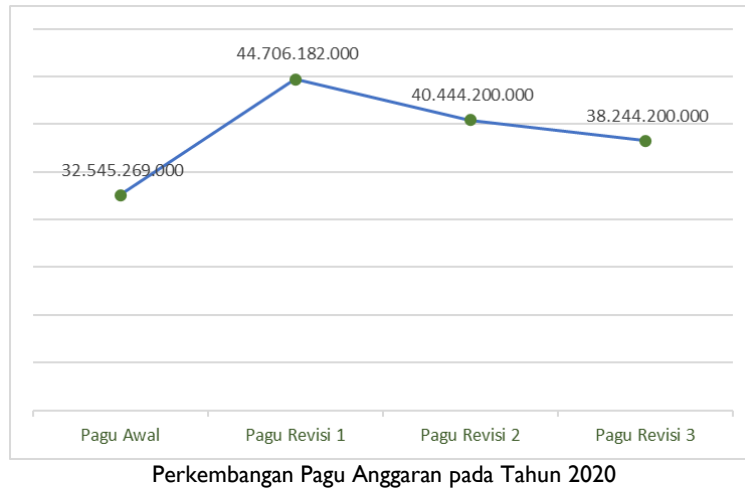
Langkah Antisipatif

Langkah-langkah antisipatif yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada yaitu dengan cara melakukan koordinasi atas perubahan struktur organisasi, memantau proses penggabungan anggaran dari PPSDK ke Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, melakukan revisi anggaran yang disesuaikan dengan perubahan metode pelaksanaan kegiatan dan program prioritas Kemendikbud, memaksimalkan upaya pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, serta peningkatan koordinasi dan komunikasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan.

B. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dalam DIPA awal tahun 2020 adalah sebesar Rp32.545.269.000,00. Setelah adanya penggabungan anggaran dengan PPSDK, pagu anggaran bertambah menjadi Rp44.706.182.000,00. Kemudian, untuk mendukung program Kemendikbud pada masa pandemi Covid-19 berupa Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2020, pagu anggaran Pusbanglin dikurangi menjadi 40.444.200.000. Selain pengurang anggaran untuk program

bantuan kuota data internet, terjadi juga pemotongan anggaran untuk realokasi kepada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (PLPP) Kemendikbud, sehingga pagu anggaran berkurang lagi menjadi Rp38.244.200.000,00.



Dari pagu anggaran terakhir tersebut, berhasil direalisasikan sebesar Rp29.865.435.694,00 (data SP2D OMSPAN) dengan persentase daya serap sebesar 78,09%. Pagu tersebut digunakan untuk membiayai pencapaian lima sasaran kegiatan dengan 13 indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.





Tabel Penyerapan Anggaran Setiap IKK

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Daya Serap
1. Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia	1.1 Jumlah kosakata bahasa Indonesia	1.245.760.000	700.767.494	56,25
2. Terwujudnya standar kemahiran berbahasa Indonesia	2.2 Jumlah instrumen uji kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI)	2.571.093.000	1.976.068.036	76,86
	2.2 Jumlah acuan kebahasaan dan kesastraan	194.573.000	130.526.700	67,08
	2.3 Jumlah bahan ajar kebahasaan	1.182.916.000	868.256.450	73,40
	2.4 Jumlah rekomendasi kebijakan kebahasaan dan kesastraan melalui penelitian	4.231.693.000	2.263.134.298	53,48
3. Meningkatnya jumlah partisipasi aktif dalam pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan	3.1 Jumlah lembaga terfasilitasi secara kebahasaan	965.924.000	634.838.631	65,72
	3.2 Jumlah pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)	6.017.060.000	5.518.864.262	91,72
	3.3 Jumlah bahan pengayaan laboratorium kebahasaan	498.805.000	242.332.350	48,58
4. Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam	4.1 Jumlah penutur muda yang terlibat dalam pelindungan bahasa daerah kritis dan terancam punah	1.498.453.000	1.061.112.221	70,81
	4.2 Jumlah penutur muda yang terlibat dalam pelindungan sastra daerah kritis dan terancam punah	1.348.709.000	1.102.538.864	81,75
	4.3 Jumlah produk kesastraan terkembangkan	598.933.000	442.144.578	73,82
5. Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	5.1 Predikat sakin satker minimal BB	1.637.195.000	1.222.788.994	74,69
	5.2 Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L satker minimal 91	16.253.086.000	13.702.062.816	84,30

C. Efisiensi Sumber Daya

Terjadinya dua kali pengurangan pagu alokasi anggaran pada Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dan di tengah kondisi pandemi Covid-19 pada tahun 2020, tidak mengurangi semangat untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Kondisi pandemi Covid-19 dan pengurangan anggaran yang terjadi pada beberapa IKK merangsang para pelaksana kegiatan untuk menyesuaikan metode pelaksanaan kegiatan dalam mencapai target kinerja. Hal itu menjadikan terjadinya efisiensi anggaran karena terdapat beberapa IKK yang bahkan dapat melebihi target kinerja. IKK yang dapat melakukan efisiensi anggaran tersebut yaitu: IKK rekomendasi kebijakan kebahasaan dan kesastraan melalui penelitian, IKK lembaga terfasilitasi secara kebahasaan, dan IKK pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA). Nilai efisiensi pun diakui dalam aplikasi SMART DJA yang nampak pada tangkapan layar berikut.

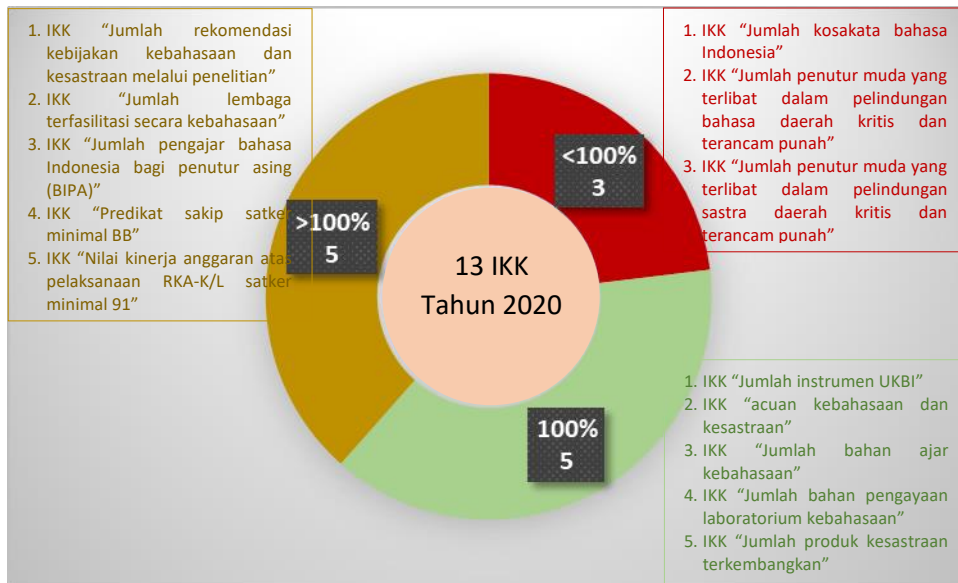


Nilai Efisiensi yang Tercantum pada Nilai EKA SMART-DJA Tahun 2020

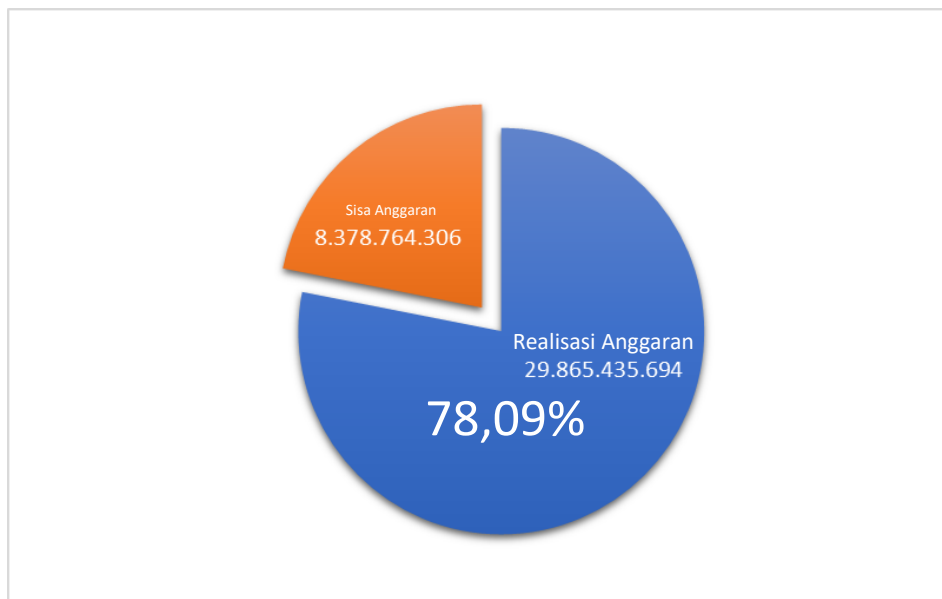


BAB IV PENUTUP

Selama tahun 2020, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, secara umum berhasil melaksanakan kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.



Grafik Capaian 13 IKK pada Tahun 2020



Grafik Kinerja Keuangan Tahun 2020

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

1. Permasalahan indikator kinerja kegiatan pada Renstra 2020—2024.
2. Koordinasi dan kerja sama, baik di tingkat Pusat, antara Pusat dan Pemerintah Daerah, maupun antara UPT dan Pemerintah Daerah setempat yang belum terlalu maksimal dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra.
3. Permasalahan sumber daya manusia, baik tenaga lingusitik dengan keahlian khusus, tenaga TIK untuk aplikasi kebahasaan, maupun tenaga administrasi di unit teknis, yang sering menjadi permasalahan karena belum ditindaklanjuti secara optimal.
4. Kepedulian/perhatian terhadap implementasi/pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah atau kinerja atas pelaksanaan anggaran, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi kinerja.
5. Pelaksanaan kegiatan di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang kemungkinan masih akan berlangsung sepanjang tahun 2021.
6. Hadirnya program KKLP dalam pelaksanaan kegiatan.
7. Fasilitas pendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain:

1. Melakukan telaah/peninjauan kembali atas Renstra Tahun 2020—2024 dengan catatan harus memberikan perhatian yang lebih besar dalam proses tersebut.
2. Penambahan SDM yang benar-benar sesuai kualifikasi dan dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja
3. Peningkatan komunikasi dan koordinasi, baik di lingkungan internal maupun dengan pihak luar instansi.
4. Mencari solusi dan inovasi dalam pelaksanaan kegiatan di tengah kondisi Covid-19.
5. Pemantauan atas pelaksanaan kegiatan dan keterserapan anggaran serta ketercapaian target kinerja harus lebih intens dilaksanakan.
6. Konsep KKLP harus benar-benar dimatangkan hingga tahap pedoman/petunjuk teknis pelaksanaannya.
7. Pemberian fasilitas pendukung yang lebih baik dalam pelaksanaan kegiatan.



LAMPIRAN

Lampiran I. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (Awal)



Perjanjian Kinerja Tahun 2020
plt. Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa
dan Sastra
dengan
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dora Amalia

Jabatan : plt. Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : E. Aminudin Aziz

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa

(E. Aminudin Aziz)

Jakarta, Agustus 2020
plt. Kepala Pusat Pengembangan
dan Pelindungan Bahasa dan
Sastra

(Dora Amalia)



2008240931274



TARGET KINERJA

No	Sesaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1	Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia	1.1 Jumlah kosakata bahasa Indonesia	Kosakata	16.000,00
		1.2 Jumlah instrumen uji kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI)	Baterai	4,00
2	Terwujudnya standar kemahiran berbahasa Indonesia	2.1 Jumlah acuan kebahasaan dan kesastraan	Naskah	3,00
		2.2 Jumlah bahan ajar kebahasaan	Naskah	7,00
		2.3 Jumlah rekomendasi kebijakan kebahasaan dan kesastraan melalui penelitian	Dokumen	38,00
3	Meningkatnya jumlah partisipan aktif dalam pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan	3.1 Jumlah lembaga terfasilitasi secara kebahasaan	Lembaga	112,00
		3.2 Jumlah pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)	Orang	220,00
		3.3 Jumlah bahan pengayaan laboratorium kebahasaan	Bahan	50,00
4	Terlindungnya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah	4.1 Jumlah penutur muda yang terlibat dalam pelindungan bahasa daerah kritis dan terancam punah	Orang	1.500,00
		4.2 Jumlah penutur muda yang terlibat dalam pelindungan sastra daerah kritis dan terancam punah	Orang	1.500,00
		4.3 Jumlah produk kesastraan dikembangkan	Sastra	4,00
5	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	5.1 Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	BB
		5.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL Satker minimal 91	Nilai	91,00

KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2021	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	44.627.553.000
TOTAL			44.627.553.000

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

(E. Aminudin Aziz)

Jakarta, Agustus 2020
Plt. Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

(Dora Amalia)



2008240931274



Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (Revisi)

REVISI



Perjanjian Kinerja Tahun 2020
plt. Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa
dan Sastra
dengan
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dora Amalia

Jabatan : plt. Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : E. Aminudin Aziz

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa

Jakarta, Desember 2020
plt. Kepala Pusat Pengembangan
dan Pelindungan Bahasa dan
Sastra

E. Aminudin Aziz

Dora Amalia



2012100517294



TARGET KINERJA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1	Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia	1.1 Jumlah kosakata bahasa Indonesia	Kosakata	16.000,00
2	Tertanggungjawabnya standar kemahiran berbahasa Indonesia	2.1 Jumlah instrumen uji kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI)	Baterai	4,00
		2.2 Jumlah acuan kebahasaan dan kesastran	Naskah	3,00
		2.3 Jumlah bahan ajar kebahasaan	Naskah	7,00
		2.4 Jumlah rekomendasi kebijakan kebahasaan dan kesastran melalui penelitian	Dokumen	38,00
3	Meningkatnya jumlah partisipan aktif dalam pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan	3.1 Jumlah lembaga terfasilitasi secara kebahasaan	Lembaga	112,00
		3.2 Jumlah pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)	Orang	220,00
		3.3 Jumlah bahan pengayaan laboratorium kebahasaan	Bahan	50,00
4	Terlindungnya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah	4.1 Jumlah penutur muda yang terlibat dalam pelindungan bahasa daerah kritis dan terancam punah	Orang	500,00
		4.2 Jumlah penutur muda yang terlibat dalam pelindungan sastra daerah kritis dan terancam punah	Orang	500,00
		4.3 Jumlah produk kesastran terkembangkan	Sastra	4,00
5	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	5.1 Predikat SAPK Satker minimal BB	Predikat	BB
		5.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL Satker minimal 91	Nilai	91,00

KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2021	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	38.244.200.000
TOTAL			38.244.200.000

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

(E. Aminudin Aziz)

Jakarta, Desember 2020
Plt. Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

(Dora Amalia)



2012100517294



Lampiran 3. Pengukuran Kinerja Tahun 2020

PENGUKURAN KINERJA

Satuan Kerja : Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
Tahun : 2020

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran	Realisasi			
				Target	%	Anggaran	%
Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia	1.1 Jumlah kosakata bahasa Indonesia	16.000 kosakata	1.245.760.000	15.599 kosakata	97,49%	700.767.494	56,25%
Terwujudnya standar kemahiran berbahasa Indonesia	2.1 Jumlah instrumen uji kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI)	4 baterai	2.571.093.000	4 baterai	100%	1.976.068.036	76,86%
	2.2 Jumlah acuan kebahasaan dan kesastraan	3 naskah	194.573.000	3 naskah	100%	130.526.700	67,08%
	2.3 Jumlah bahan ajar kebahasaan	7 naskah	1.182.916.000	7 naskah	100%	868.256.450	73,40%
	2.4 Jumlah rekomendasi kebijakan kebahasaan dan kesastraan melalui penelitian	38 dokumen	4.231.693.000	39 dokumen	102,63%	2.263.134.298	53,48%
Meningkatnya jumlah partisipan aktif dalam pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan	3.1 Jumlah lembaga terfasilitasi secara kebahasaan	112 lembaga	965.924.000	120 lembaga	107,14%	634.838.631	65,72%
	3.2 Jumlah pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)	220 orang	6.017.060.000	221 orang	100,45%	5.518.864.262	91,72%
	3.3 Jumlah bahan pengayaan laboratorium kebahasaan	50 bahan	498.805.000	50 bahan	100%	242.332.350	48,58%
Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam	4.1 Jumlah penutur muda yang terlibat dalam pelindungan bahasa daerah kritis dan terancam punah	500 orang	1.498.453.000	424 orang	84,80%	1.061.112.221	70,81%
	4.2 Jumlah penutur muda yang terlibat dalam pelindungan sastra daerah kritis dan terancam punah	500 orang	1.348.709.000	385 orang	77,00%	1.102.538.864	81,75%
	4.3 Jumlah produk kesastraan terkembangkan	4 sastra	598.933.000	4 sastra	100%	442.144.578	73,82%
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pmbinaan Bahasa	5.1 Predikat SAKIP satker minimal BB	BB predikat	1.637.195.000	A predikat	112%	1.222.788.994	74,69%
	5.2 Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L satker minimal 91	91 nilai	16.253.086.000	94,04 nilai	103%	13.702.062.816	84,30%



Lampiran 4. Lembar Reviu

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
TAHUN ANGGARAN 2020**

Kami telah mereviu laporan kinerja Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk tahun anggaran 2020, sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 19 November 2020
Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa

Yiyung Yuningsih
NIP 197911072005012001